

2024
Laporan Tahunan
Annual Report



Leveraging Impact for Inclusive Policy

The PRAKARSA



2024
Laporan Tahunan
Annual Report



Leveraging Impact
for Inclusive Policy

2024
Laporan Tahunan
Annual Report



Ringkasan Eksekutif Executive Summary

Selamat datang di laporan tahunan 2024 The PRAKARSA.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dinamika bagi The PRAKARSA, terutama dengan berlangsungnya kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Gelombang politik ini tidak hanya memengaruhi lanskap politik nasional, tetapi juga aktivitas organisasi kami, khususnya dalam aspek advokasi kebijakan dan pelaksanaan proyek.

Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada, serta dinamika politik yang menyertainya, telah menambah kompleksitas dalam kerja kami. The PRAKARSA harus aktif memberikan masukan dan merespon isu-isu. Semua ini berkontribusi pada perubahan dinamika internal dan eksternal organisasi, menciptakan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi situasi yang terus berubah.

Komposisi baru di parlemen juga membawa dampak signifikan terhadap pelaksanaan proyek, terutama untuk proyek *Low Carbon Development Initiative Phase 2 (LCDI-2)*. Dalam proyek ini, The PRAKARSA memiliki agenda penting untuk memetakan peran parlementarian terkait isu *green economy*. Dengan adanya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang melakukan perubahan dan penambahan Kementerian/Lembaga, kami juga harus menyesuaikan kembali strategi advokasi kami.

Selain itu, akses Indonesia menjadi anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan penunjukan The PRAKARSA sebagai salah satu wakil *Civil Society Organization (CSO)* di Tim Nasional Akses Indonesia ke OECD

Welcome to The PRAKARSA's 2024 Annual Report.

The year 2024 has proven to be challenging and dynamic for The PRAKARSA, particularly with the simultaneous Presidential, Legislative, and Regional Elections. This political wave has not only impacted the national political landscape but has also influenced our organizational activities, especially in policy advocacy and project implementation.

Activities related to the Presidential, Legislative, and Regional Elections, along with their political dynamics, have added complexity to our work. The PRAKARSA had to actively provide input and respond to emerging issues. All of this has contributed to changes in both the internal and external dynamics of the organization, creating a need for rapid adaptation to the constantly evolving situation.

The new parliamentary composition has also had a significant impact on the implementation of projects, particularly the *Low Carbon Development Initiative Phase 2 (LCDI-2)*. In this project, The PRAKARSA has an important agenda to map the role of parliamentarians in relation to green economy issues. With the new administration led by Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka, which has introduced changes and additional Ministries/Agencies, we are also required to realign our advocacy strategies.

Additionally, Indonesia's accession to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and The PRAKARSA's designation as one of the representatives of Civil Society Organizations (CSOs) on the National Team for Indonesia's Accession to

menambah tanggung jawab dan pekerjaan bagi organisasi. Hal ini menciptakan peluang baru, tetapi juga menuntut komitmen dan sumber daya yang lebih besar.

Di tahun yang sama, kami merayakan dua dekade perjalanan The PRAKARSA. Kami menunjukkan komitmen kuat terhadap kebijakan yang inklusif dengan menyerahkan *white paper* rekomendasi kepada perwakilan pemerintah. Rekomendasi ini berfokus pada tiga isu utama: kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan langkah ini, The PRAKARSA berperan aktif dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung transparansi dan tata kelola yang baik. Laporan Tahunan The PRAKARSA Tahun 2024 ini disampaikan sebagai informasi organisasi yang berlangsung selama 2024 dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan organisasi oleh Badan Pengurus Harian (BPH) dan tugas pengawasan Badan Pengurus (BP) terhadap organisasi selama tahun buku 2024. Laporan Tahunan ini disajikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja organisasi selama tahun buku kepada seluruh pemangku kepentingan.

Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, tahun ini The PRAKARSA berkomitmen untuk mengedepankan tema "*Leveraging Impact for Inclusive Policy*." Tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, memerlukan pendekatan kebijakan yang inovatif dan responsif. Melalui analisis data dan hasil penelitian yang komprehensif, kami dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat. Kami bertekad untuk tidak hanya menghasilkan kebijakan yang efektif, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

the OECD has added responsibilities and work for our organization. While this creates new opportunities, it also demands greater commitment and resources.

In the same year, we celebrated two decades of The PRAKARSA's journey. We have demonstrated a strong commitment to inclusive policies by submitting a white paper of recommendations to current government representatives. These recommendations focus on three main issues: social policy, fiscal policy, and sustainable development policy. With this initiative, The PRAKARSA is actively supporting the vision of Indonesia Emas 2045 and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, while also strengthening Indonesia's position at the global stage.

As part of our commitment to promoting transparency and good governance, this Annual Report for 2024 serves as an organizational update and a form of accountability from the Management (BPH) and the oversight responsibilities of the Board of Supervisors (BP) for the organization during the fiscal year 2024. The Annual Report aims to provide a comprehensive understanding of our organizational performance throughout the year to all stakeholders.

Amid the ever-changing social and economic dynamics, The PRAKARSA is dedicated to prioritizing the theme "*Leveraging Impact for Inclusive Policy*." The challenges faced by society, such as economic inequality and access to basic services, require innovative and responsive policy approaches. Through comprehensive data analysis and research findings, we can provide the insights necessary to create policies that address the needs of all societal layers. We are committed to not only producing effective policies but also building a more just and equitable society.



Daftar Isi

Table of Content

Ringkasan Eksekutif Executive Summary	3	Struktur Organisasi Organizational Structure	25
Daftar Isi Table of Content	5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Development	43
Kesinambungan Tema Theme Continuity	7	Kesejahteraan staf Staff Well-being	45
Laporan Direktur Eksekutif PRAKARSA Report from the Executive Director of The PRAKARSA	9	Kesetaraan <i>gender</i> , keberagaman dan inklusi Gender equality, diversity and inclusion	46

01 PENDAHULUAN

Introduction

Sejarah The PRAKARSA History of The PRAKARSA	15
Sekilas The PRAKARSA Overview of The PRAKARSA	17
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Kami Our Vision, Mission and Values	19
Budaya Organisasi Organisational Culture	21

02 SOROTAN JEJAK LANGKAH

Highlights of Our Journey

Dua dekade perjalanan The PRAKARSA Two Decades of The PRAKARSA's Journey	47
The PRAKARSA Memperjuangkan Penerapan Pajak Kekayaan untuk Ekonomi yang Inklusif The PRAKARSA Advocates for the Implementation of Wealth Tax for an Inclusive Economy	49
Dampak Advokasi Pajak Kekayaan Pada Kebijakan Nasional Impact of Wealth Tax Advocacy on National Policy	51
Produk Penelitian dan Pengetahuan Research and Knowledge Products	55

Sekilas Unit Bisnis
Business Unit Overview

Kolaborasi Multipihak
Multi-Stakeholder Collaboration

03

TANTANGAN YANG DIHADAPI SEPANJANG TAHUN 2024

Challenges Faced Throughout
2024

04

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Transparency and Accountability

Ringkasan Kinerja Keuangan The PRAKARSA
Summary of The PRAKARSA's Financial
Performance

Hasil Audit Tahun 2024
Audit Results for 2024

Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak
Compliance with Tax Regulations

78

82

83

89

92

92

95

05

RENCANA DAN INISIATIF TAHUN 2025 Plans and Initiatives for 2025

97

06

MEDIA ENGAGEMENT DAN PUBLIC RELATIONS Media Engagement and Public Relations

101

Kinerja Media dan Komunikasi
Media and Communication Performance

103

Kampanye Sosial Media
Social Media Campaign

105

07

PENUTUP Closing

107

Ringkasan Pencapaian Utama Tahun 2024
Summary of Key Achievements in 2024

109

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

110

Ungkapan Terima Kasih
Expression of Gratitude

112

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



The Year of Resilience

Tahun 2021 menjadi masa ujian ketika pandemi COVID-19 masih melanda. PRAKARSA menjaga keberlangsungan program dengan menyesuaikan metode kerja daring maupun luring, memastikan program tetap berjalan tepat waktu. Adaptasi kebiasaan baru menunjukkan kemampuan organisasi tetap relevan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui laporan tahunan, PRAKARSA menegaskan komitmen akuntabilitas publik, mencatat capaian dan tantangan organisasi, serta menjadikan pengalaman resiliensi selama pandemi sebagai pijakan melangkah lebih kuat ke tahun berikutnya.

The year 2021 was a true test as the COVID-19 pandemic persisted. PRAKARSA maintained program continuity by adapting work methods, both online and offline, ensuring timely implementation. Adjusting to new habits demonstrated the organization's ability to remain relevant amid unavoidable social, economic, and cultural shifts. Through this annual report, PRAKARSA reaffirms its commitment to public accountability, records organizational achievements and challenges, and positions its resilience during the pandemic as a foundation for moving forward stronger into the following year.



Thriving in Challenging Times

Memasuki fase pemulihan pasca pandemi, 2022 menjadi momentum bagi PRAKARSA untuk bangkit dan bergerak menuju transformasi organisasi 2021–2025. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas sebagai lembaga riset berstandar global, meski dalam situasi penuh tantangan. Keterlibatan Indonesia dalam Presidensi G20, termasuk Civil 20, memberi peluang bagi PRAKARSA untuk memperkuat kepemimpinan dan posisi di level global. Laporan tahun ini disusun dengan pendekatan outcome harvesting, mencerminkan capaian kerja, sumber daya, dan akuntabilitas organisasi sebagai wujud peningkatan kepercayaan publik.

As the world entered a post-pandemic recovery phase, 2022 became a momentum for PRAKARSA to rise and progress toward its organizational transformation for 2021–2025. The focus was directed toward strengthening its capacity as a global, even in difficult circumstances Indonesia's G20 Presidency, including Civil 20, offered PRAKARSA an opportunity to reinforce its leadership and visibility at the global level. This year's report was prepared using an outcome harvesting approach, reflecting work achievements, human resources, and organizational accountability as a way of strengthening public trust in PRAKARSA.



A Journey of Resilient Growth

Tahun 2023 diwarnai krisis geopolitik, inflasi global, dan ancaman iklim. PRAKARSA tangguh memperluas peran nasional melalui advokasi RPJP dan RPJMN, serta regional lewat keterlibatan keketuaan ASEAN. Fokus advokasi jaminan sosial pekerja migran, bisnis inklusif, pembangunan berkelanjutan. Tema *A Journey of Resilient Growth* menegaskan pertumbuhan organisasi tidak instan, melainkan proses berkelanjutan. Di tengah kesulitan, PRAKARSA bergerak maju memperkuat komitmen. Laporan ini mencerminkan capaian dan akuntabilitas organisasi sebagai kontribusi masyarakat, bangsa, dan komunitas global.

The year 2023 was marked by geopolitical crises, global inflation, and climate threats. PRAKARSA remained resilient, expanding its national role through advocacy for RPJP and RPJMN, and regional engagement in ASEAN chairmanship. Advocacy focused on migrant workers' social protection, inclusive business, and sustainable development. The theme *A Journey of Resilient Growth* affirms that organizational growth is not instant but a continuous process. Amid challenges, PRAKARSA moved forward, strengthening its commitment. This report reflects the organization's achievements and accountability as contributions to society, the nation, and the global community.



20 Years Forward: From Resilience to Impact

Tahun 2024 menjadi momen istimewa bagi PRAKARSA, menandai dua dekade perjuangan organisasi mendorong kebijakan adil, demokratis, makmur, dan berkelanjutan. Setelah fase *resilience* saat pandemi, *thriving* pasca pandemi, serta *resilient growth* di tengah dinamika global, PRAKARSA kini memasuki usia kedewasaan. Dua puluh tahun adalah tonggak penting, fase ketika kedewasaan bertransformasi menjadi keberanian menghasilkan dampak nyata. Laporan tahunan ini menegaskan orientasi pada *policy impact* berkelanjutan di tingkat nasional, regional, dan global, merefleksikan perjalanan panjang dari ketahanan menuju kontribusi nyata berdampak luas.

The year 2024 is a special milestone for PRAKARSA, marking two decades of advancing just, democratic, prosperous, and sustainable policies. After resilience during the pandemic, thriving in post-pandemic challenges, and resilient growth amid global dynamics, PRAKARSA enters organizational maturity. Twenty years is a crucial turning point, where maturity transforms into courage to deliver real impact. This annual report affirms PRAKARSA's orientation toward sustainable policy impact at national, regional, and global levels, reflecting its journey from resilience to meaningful, broader contributions.



Laporan Direktur Eksekutif The PRAKARSA Executive Director of The PRAKARSA

“Laporan Tahunan 2024 ini merupakan laporan yang spesial, pasalnya bertepatan dengan 20 tahun usia PRAKARSA. Jika diibaratkan dengan usia manusia, 20 tahun merupakan awal masa dewasa. Pun demikian dengan PRAKARSA, memasuki usia dewasa. Kedewasaan bagi kami adalah masa di mana kami harus berani menjawab tantangan dan tuntutan. Kami harus mampu mengatasi berbagai tantangan sekaligus memenuhi berbagai tuntutan.”

This 2024 Annual Report holds special significance as it marks the 20th anniversary of PRAKARSA. If we think of it in human terms, turning 20 is like stepping into adulthood. In the same way, PRAKARSA is now entering this pivotal stage. For us, maturity means embracing challenges and meeting demands head-on. We must navigate various obstacles while fulfilling the expectations placed upon us.

Ah Maftuchan
Executive Director of The PRAKARSA

Sebagai organisasi yang mulai memasuki usia dewasa, kami memberanikan diri untuk terus bergerak di tengah berbagai tantangan domestik dan global yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, pada tahun 2024 kami meneguhkan diri untuk terus bekerja dengan orientasi meningkatkan dampak. Kerja-kerja produksi pengetahuan, advokasi kebijakan dan pertukaran pengetahuan yang kami jalankan diorientasikan pada pemecahan masalah (*problem solving*). Kami terus meneguhkan keyakinan bahwa rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti akan berkontribusi nyata dalam pemecahan masalah.

Tahun 2024 juga merupakan tahun yang krusial. Di tingkat domestik sedang berlangsung hajatan politik nasional, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Indonesia sedang berada pada masa transisi, masa pergantian kepemimpinan Indonesia. Dinamika sosial-ekonomi-politik yang terjadi kami sikapi dengan berbagai cara. Selain memberikan catatan atau pandangan melalui media massa, kami juga menyusun rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam pemikiran kami, pemimpin yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum merupakan pemimpin semua golongan, tak terkecuali bagi mereka yang tidak memilihnya dalam pemilihan umum. Agar arah kebijakan pembangunan ke depan sesuai aspirasi publik, berbasis bukti, inklusif dan berdampak, maka kami menawarkan berbagai menu kebijakan yang dapat berkontribusi bagi pemecahan masalah bangsa-negara. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-20 PRAKARSA dan proses peralihan kepemimpinan nasional, maka kami menyusun *white-paper*: proposal kebijakan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 2024-2029 **“Terus Melaju, Menuju Indonesia Maju yang Adil, Makmur, Demokratis dan Berkelanjutan”**. Proposal kebijakan ini kami luncurkan dan serahkan kepada perwakilan Partai Gerindra yang memenangi pemilihan presiden 2024.

As an organization entering adulthood, we dare to continue moving forward amid various domestic and global challenges. Therefore, in 2024, we reaffirm our commitment to work with a focus on increasing impact. Our knowledge production, policy advocacy, and knowledge exchange efforts are oriented towards problem-solving. We firmly believe that evidence-based policy recommendations will contribute significantly to addressing issues.

The year 2024 is also crucial. A national political event, the presidential and legislative elections, is underway domestically. Indonesia is in a transitional period, with a change in leadership. We respond to the socio-economic-political dynamics in various ways. In addition to providing notes or views through mass media, we also prepare policy recommendations that we present to the elected President and Vice President.

In our view, leaders elected through the electoral process represent all groups, including those who did not vote for them. To ensure that future development policies align with public aspirations, are evidence-based, inclusive, and impactful, we offer various policy options that can contribute to solving national issues. Coinciding with PRAKARSA's 20th anniversary and the national leadership transition, we have prepared a white paper: a policy proposal for the Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka administration for 2024-2029 titled **“Continuing Forward Towards a Just, Prosperous, Democratic, and Sustainable Indonesia.”** This policy proposal was launched and submitted to representatives of the Gerindra Party, which won the presidential election in 2024.



Proposal kebijakan tersebut merangkum analisis mendalam dan rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kebijakan sosial, fiskal, serta pembangunan berkelanjutan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di tengah tantangan yang semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam konteks reformasi kelembagaan otoritas pajak, PRAKARSA mendukung rencana pemerintahan baru yang akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Reformasi kelembagaan otoritas pajak ini merupakan usulan yang telah diajukan oleh PRAKARSA sejak tahun 2015.

Selain itu, kontribusi nyata PRAKARSA lainnya adalah menjadi anggota tim nasional komite tata kelola lembaga publik (*public governance committee*) akses Indonesia menjadi anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2024.

Di tingkat global, konflik geopolitik juga terjadi dan mempengaruhi lanskap pembangunan global. Setali tiga uang dengan langkah di tingkat domestik, kami juga terus melanjutkan kerja-kerja di tingkat global. Pada tahun 2024, Direktur Eksekutif PRAKARSA terpilih menjadi anggota *steering committee Fair Finance Asia (FFA)*, jejaring organisasi masyarakat sipil di 10 negara di kawasan Asia yang bekerja untuk pemajuan agenda keuangan berkelanjutan dan investasi yang bertanggung-jawab.

Pada isu perpajakan, Direktur Eksekutif the PRAKARSA juga terpilih menjadi satu-satunya panelis dari unsur organisasi masyarakat sipil dunia pada acara the *2024 UN-ECOSOC Special Meeting on International Cooperation in Tax Matters* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat. PRAKARSA mendukung langkah UN untuk berperan nyata dalam tata kelola perpajakan global

The policy proposal summarizes in-depth analysis and recommendations designed to strengthen social, fiscal, and sustainable development policies. All of this aims to create a more prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Indonesian society amidst increasingly complex challenges such as poverty, inequality, climate change, and economic instability. In the context of institutional reform of the tax authority, PRAKARSA supports the new government's plan to establish a National Revenue Agency. This institutional reform proposal for the tax authority has been suggested by PRAKARSA since 2015.

Additionally, PRAKARSA's tangible contributions include being a member of the national team of the public governance committee for Indonesia's accession to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), established by the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia in 2024.

On a global level, geopolitical conflicts are also occurring and affecting the global development landscape. Alongside our domestic efforts, we continue our work at the global level. In 2024, PRAKARSA's Executive Director was elected as a member of the steering committee for Fair Finance Asia (FFA), a network of civil society organizations in 10 Asian countries working to promote sustainable finance and responsible investment agendas.

Regarding taxation issues, the Executive Director of PRAKARSA was also selected as the sole panelist representing global civil society organizations at the *2024 UN-ECOSOC Special Meeting on International Cooperation in Tax Matters* at the United Nations headquarters in New York, USA. PRAKARSA supports the UN's role in global tax governance through the accelerated development of the UN Tax Convention.

melalui percepatan penyusunan *UN Tax Convention*. PRAKARSA juga mempromosikan pajak kekayaan (*wealth-tax*) sebagai salah satu jalan mobilisasi sumber pendanaan pembangunan.

Melalui *Civil-20, an official engagement group of G20*, PRAKARSA juga melanjutkan kerja-kerja advokasi kebijakan di tingkat global. Pada G20 Presidensi Brazil 2024, PRAKARSA berkontribusi menjadi anggota *International Advisory Committee of Civil-20*. Pada momentum ini, kami mempromosikan pajak kekayaan (*wealth-tax*). Presidensi G20 Brazil akhirnya mengajukan secara resmi isu pajak kekayaan dalam sidang tingkat menteri keuangan G20, namun belum disepakati menjadi konsensus G20 dan hanya menegaskan bahwa perlunya G20 untuk “*to engage cooperatively to ensure that individuals with very high wealth will be taxed effectively*”. Di tingkat domestik, pajak kekayaan mulai di rekognisi pemerintah, pada dokumen Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Kemenkeu, 2023), pemerintah menyusun kerangka kebijakan teknis untuk peningkatan pendapatan negara, salah satunya dengan melakukan ekstensifikasi pada wajib pajak HWI (*high-wealth individuals*).

Catatan di atas merupakan beberapa contoh tentang realisasi atas komitmen kami tentang kerja yang berdampak. Hal ini tentu bukan kerja yang singkat dan bukan hanya kerja kami. Hasil-hasil kerja tersebut juga merupakan buah dari kerja bersama dan berbagai inisiatif yang kami jalankan bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan *think-tank* lain, baik di tingkat domestik maupun di tingkat regional-global. Di sinilah konteks tema laporan tahun 2024 “*leveraging impact for inclusive policy*”. Kami akan terus bertekad untuk tidak hanya berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang efektif, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

PRAKARSA also promotes a wealth tax as one avenue for mobilizing development funding.

Through *Civil-20, an official engagement group of the G20*, PRAKARSA continues its policy advocacy work globally. During the G20 Brazil Presidency in 2024, PRAKARSA contributed as a member of the *International Advisory Committee of Civil-20*. At this moment, we promoted the wealth tax. The G20 Brazil Presidency officially raised the wealth tax issue at the G20 finance ministerial meeting, but it was not agreed upon as a G20 consensus, only affirming the need for the G20 “*to engage cooperatively to ensure that individuals with very high wealth will be taxed effectively*.” Domestically, the wealth tax is beginning to be recognized by the government. In the 2024 APBN Information document: *Accelerating Inclusive and Sustainable Economic Transformation* (Ministry of Finance, 2023), the government is preparing a technical policy framework for increasing state revenue, including the extensification of high-wealth individuals (HWI) taxpayers.

The above notes illustrate some examples of our commitment to impactful work. This is certainly not a short-term effort nor solely our work. The results are also the fruits of collaborative efforts and various initiatives we undertake with civil society organizations and other think tanks, both domestically and regionally-globally. This context aligns with the theme of the 2024 report: “*Leveraging Impact for Inclusive Policy*.” We remain determined not only to contribute to the emergence of effective policies but also to build a more just and equitable society.



Di sisi lain, dukungan dari berbagai lembaga donor dan lembaga kerja sama pembangunan juga sangat berkontribusi dalam kerja-kerja kami. Melalui laporan ini, kami perlu menyampaikan terima kasih secara khusus kepada lembaga filantropi Ford Foundation, lembaga *think-tank* FES, lembaga pembangunan global OXFAM, lembaga *think-tank* Oxford Policy Management dan lainnya yang telah mendukung kerja PRAKARSA. Secara khusus, terima kasih kepada Badan Pengurus PRAKARSA yang telah memberikan arahan terhadap Badan Pelaksana Harian PRAKARSA. Terima kasih kepada seluruh staf PRAKARSA dan konsultan PRAKARSA yang telah bekerja cerdas dan bekerja keras sehingga PRAKARSA dapat berkontribusi dalam kemajuan pembangunan di tingkat domestik, regional dan global.

Laporan Tahunan 2024 ini merupakan salah satu langkah kami untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan ini menyajikan berbagai ringkasan kegiatan, capaian organisasi dan ringkasan keuangan PRAKARSA 2024. Kami berharap laporan ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders kepada PRAKARSA.

PRAKARSA berkomitmen untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kami berharap kepada para pihak untuk terus mendukung kami. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami selama ini.

On another note, support from various donor agencies and development cooperation institutions has greatly contributed to our work. Through this report, we would like to extend our special thanks to philanthropic institutions such as the Ford Foundation, the FES think tank, global development organizations like OXFAM, Oxford Policy Management think tank, and others that have supported PRAKARSA's work. Special thanks to the Board of Directors of PRAKARSA for their guidance to the Daily Executive Board. Thank you to all PRAKARSA staff and consultants who have worked smartly and diligently so that PRAKARSA can contribute to the advancement of development at domestic, regional, and global levels.

This Annual Report 2024 is one of our steps to uphold the principles of transparency and public accountability. This report presents various summaries of activities, organizational achievements, and financial summaries of PRAKARSA for 2024. We hope this report can enhance stakeholders' trust in PRAKARSA.

PRAKARSA is committed to continuing to work and contribute to development towards a more just and prosperous society. We hope all parties will continue to support us. Once again, thank you to everyone who has supported us along the way.

Jakarta Selatan, Juli 2025

South Jakarta, July 2025

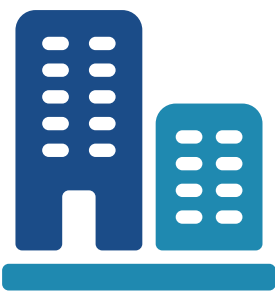
Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA
Executive Director of The PRAKARSA

PRAKARSA 20 tahun: memperkuat dampak lewat advokasi kebijakan inklusif, bukti, dan berkelanjutan di level nasional maupun global

20 Years of PRAKARSA: Strengthening Impact through Inclusive, Evidence-Based, and Sustainable Policy Advocacy at the National and Global Levels



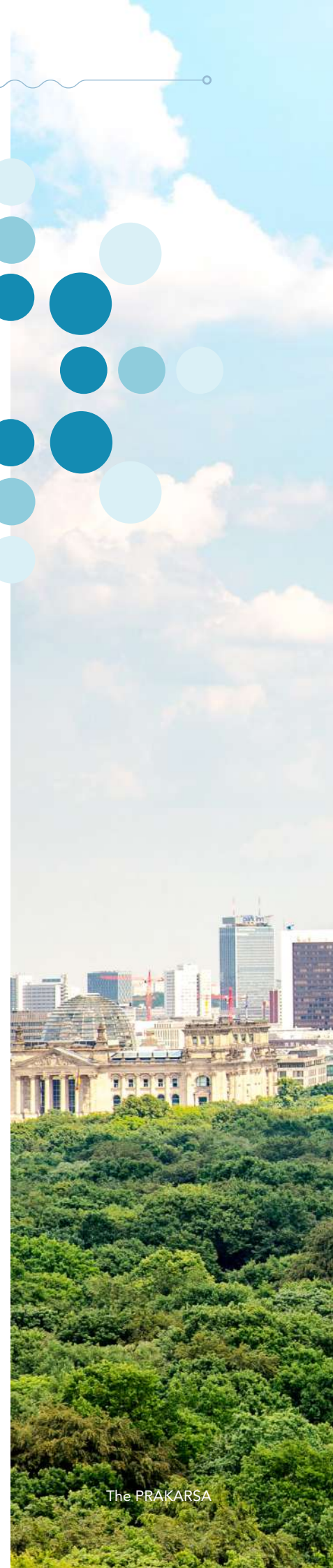


Pendahuluan

Introduction

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi.

The organisation and its staff are committed to carrying out work, making decisions, establishing policies fairly, and prioritising efforts to enhance the welfare of all employees.







Sejarah The PRAKARSA History of The PRAKARSA

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan non-profit dan non-pemerintah, dengan bentuk legal perkumpulan, yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 2004 di Jakarta melalui Akta Notaris Publik Nurul Larasati, SH Nomor 03 Tanggal 31 Agustus 2004 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005. Nama resmi The PRAKARSA adalah "Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif" atau "*Initiative for Welfare State and Alternative Development*" yang disingkat dengan PRAKARSA.

The PRAKARSA memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan

The PRAKARSA is a non-profit and non-governmental policy research and advocacy institution, legally established as an association. Founded on August 31, 2004, in Jakarta, it is documented in the Public Notary Deed of Nurul Larasati, SH Number 03, and further formalized by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-21.HT.01.03.TH.2005. The official name of PRAKARSA is "Community Initiative for an Alternative Welfare State and Development," or "Initiative for Welfare State and Alternative Development," abbreviated as PRAKARSA.

From its inception, The PRAKARSA has positioned itself as a vital support system for nurturing ideas and fostering innovation within civil society and social movements in Indonesia. This has been achieved by enhancing the capacity, expertise, and advanced skills of civil society, particularly in policy

PRAKARSA berperan membangun masyarakat demokratis, adil, dan makmur dengan menghasilkan pengetahuan serta menyebarkan ide-ide inovatif demi keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan bersama.

PRAKARSA contributes to building a democratic, just, and prosperous society by generating knowledge and promoting innovative ideas for social justice and public welfare.



kesejahteraan masyarakat. Pada awal berdirinya, The PRAKARSA menempatkan diri sebagai salah satu sistem pendukung untuk pengembangan ide dan inovasi di kalangan masyarakat sipil dan gerakan sosial di Indonesia melalui peningkatan kapasitas, keahlian dan keterampilan tingkat lanjut bagi masyarakat sipil terutama dalam aspek kebijakan dan kelembagaan. Ini sesuai dengan konteks Indonesia pada dekade awal Reformasi dimana Indonesia baru saja memasuki era demokrasi yang vibran dan terlepas dari pemerintahan otoriter sebelumnya, sehingga penting untuk mengisi era Reformasi dengan analisis dan rekomendasi kebijakan dari kalangan masyarakat sipil, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam alam demokrasi.

and institutional aspects. This mission was especially crucial during the early years of the Reformasi period, marked by Indonesia's transition to a vibrant democratic era following the end of authoritarian rule. As an organization, The PRAKARSA saw that it was essential to fill the Reformasi era with analysis and policy recommendations from civil society, thereby actively participating in the democratic process.

Pada perkembangannya, isu kebijakan dan konteks sosial ekonomi yang dialami Indonesia semakin berkembang, sehingga melalui berbagai perencanaan strategis lembaga, fokus The PRAKARSA tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan isu negara kesejahteraan dalam arti sempit, namun berkembang pada isu-isu yang semakin relevan bagi Indonesia (dan dunia). Pada pertengahan dekade kedua tahun 2000-an, fokus isu The PRAKARSA mengerucut pada tiga isu kebijakan utama yaitu Kebijakan Sosial, Kebijakan Ekonomi dan Fiskal serta Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai isu cross-cutting.

As Indonesia's policy issues and socio-economic context have evolved, The PRAKARSA's strategic planning has also adapted. The organization's focus has expanded beyond merely enhancing civil society capacity and welfare state issues in a narrow sense, to encompass a broader range of topics increasingly relevant to Indonesia and the world. By the mid-2000s, The PRAKARSA concentrated on three main policy areas: Social Policy, Economic and Fiscal Policy, and Sustainable Development as a cross-cutting issue.

Pada pertengahan dekade kedua tahun 2000-an, fokus isu PRAKARSA mengerucut pada tiga isu kebijakan utama:

By the mid-2000s, PRAKARSA had identified three main policy areas as central to its mission:



*sebagai isu cross-cutting.

These issues are interconnected and serve as focal points for PRAKARSA's efforts to address pressing challenges



Sekilas The PRAKARSA Overview of The PRAKARSA

Welfare Initiatives for Better Societies



The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, *“think and do tank”*, berbasis organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Indonesia, yang berdiri pada 31 Agustus 2004 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005.

The PRAKARSA is a research and policy advocacy institute, often described as a *“think and do tank,”* rooted in civil society organizations in Jakarta, Indonesia. Established on August 31, 2004, it was officially ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-21.HT.01.03.TH.2005.

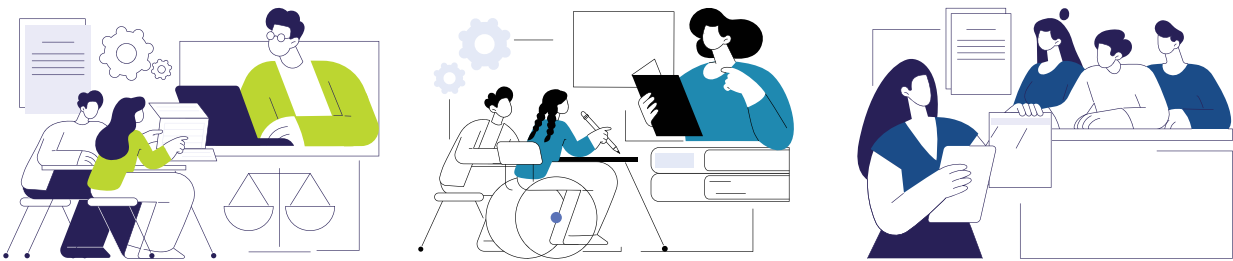


The PRAKARSA

(PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif)
(Community Initiative for an Alternative Welfare and Development State)

The PRAKARSA (PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif) memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.

The PRAKARSA (Community Initiative for an Alternative Welfare and Development State) has a mandate to contribute to the development of a democratic, just, and prosperous society through the production of knowledge and the dissemination of innovative ideas in the fields of welfare and alternative development. This mission aims to achieve socio-economic justice and enhance social welfare. The organization specifically focuses on social policy issues, fiscal policy, and sustainable development.



The PRAKARSA memilih untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan dan penguatan perumusan kebijakan publik berbasis bukti dengan pendekatan multi-pihak bersama aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah. Area kerja The PRAKARSA di tingkat lokal, nasional, dan global.

The PRAKARSA actively engages in policy advocacy and strengthens evidence-based public policy formulation through a multi-stakeholder approach, collaborating with both government and non-government actors. Its work spans local, national, and global levels.



The PRAKARSA didukung oleh peneliti, praktisi, intelektual, dan pembuat kebijakan yang memiliki reputasi dalam produksi pengetahuan dan analisis kebijakan yang inovatif, solid, dan berbasis bukti.

The PRAKARSA is supported by a diverse team of researchers, practitioners, intellectuals, and policymakers who are renowned for producing innovative, robust, and evidence-based knowledge and policy analysis.

The PRAKARSA bergerak pada ranah *“knowledge generating”*, *“engagement”*, dan *“problem solving”* agar pengetahuan berkembang menjadi sebuah tindakan kebijakan.

The PRAKARSA operates within the realms of *“knowledge generation,” “engagement,”* and *“problem-solving,”* ensuring that knowledge translates into policy action.

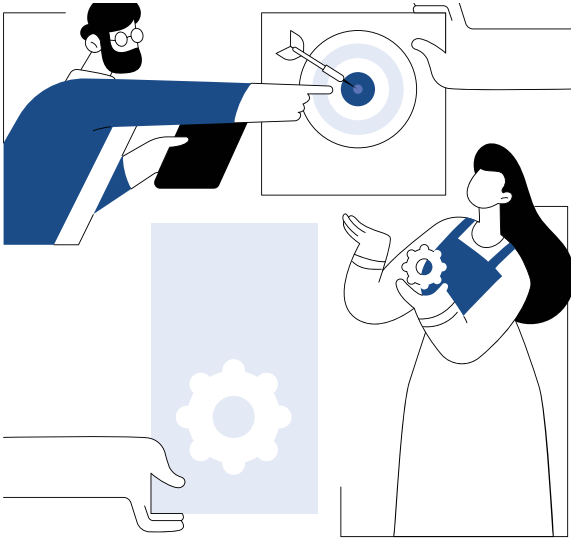
The PRAKARSA didukung oleh donor dan mitra pembangunan yang menghargai independensi analisis dan kerja-kerja kami.

The PRAKARSA receives support from donors and development partners who respect its independence in analysis and work.





Visi, Misi dan Nilai-Nilai Kami Our Vision, Mission and Values



Visi Vision

Menjadi lembaga riset dan pengembangan kapasitas yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

To become a research and capacity development institution that pioneers innovative and transformative ideas aimed at achieving socio-economic justice and prosperity.

Misi Mission

01 Memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan dan praktik kebijakan kesejahteraan

Producing and promoting welfare policy discourse, knowledge, and practices.

02 Melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Conducting research and studies in the fields of social policy, fiscal policy, and sustainable development policy.

03 Menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan

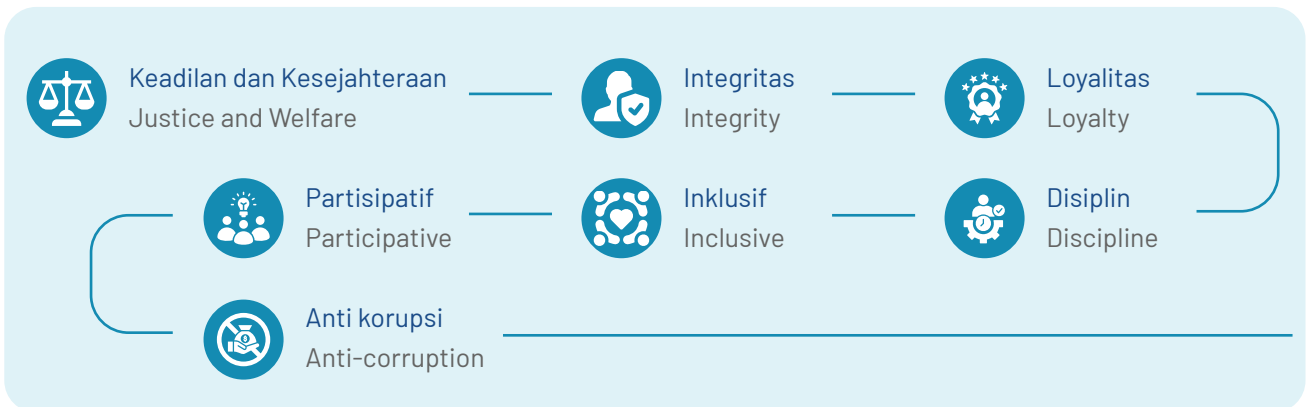
Organizing capacity development, education, and training for stakeholders.

04 Mengembangkan jejaring antar *think-tank*, OMS dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan

Developing networks among think tanks, civil society organizations (CSOs), and the private sector to initiate policy reforms.



Budaya Organisasi Organisational Culture



Keadilan dan Kesejahteraan Justice and Welfare

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk mensejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi. Sistem yang ditetapkan dalam organisasi akan memastikan terjadinya pendekatan yang objektif, adil, dan akuntabel dalam mengupayakan kesejahteraan staf. Pemenuhan hak asasi manusia dan hak pekerja dijunjung dalam organisasi dalam relasi organisasi dengan karyawan dan mitra organisasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan merupakan hal yang mendasar untuk produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

The organization and its staff are dedicated to conducting work, making decisions, and establishing policies fairly, with a focus on enhancing the welfare of all employees. The systems in place ensure an objective, fair, and accountable approach to addressing staff welfare. Upholding human rights and workers' rights in interactions with employees and partners is paramount. Efforts to improve employee welfare are fundamental to the organization's productivity and sustainability.

Integritas Integrity

Organisasi dan staf melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dengan penuh integritas. Integritas bermakna bahwa organisasi dan staf akan menjaga kejujuran dan memegang prinsip moral yang mendahulukan kepentingan bersama, akuntabilitas, dan kejujuran dalam praktik kerjanya. Staf The PRAKARSA sesungguhnya mewakili organisasi. Dengan demikian staf harus menyadari bahwa dalam

The organization and its staff are committed to conducting work, making decisions, and establishing policies fairly, prioritizing efforts to enhance the welfare of all employees. The systems in place ensure an objective, fair, and accountable approach to addressing staff welfare. Upholding human rights and workers' rights in interactions with employees and organizational partners is paramount. Efforts



perilaku yang dibawakan staf menjadi bagian dari organisasi.

to improve employee welfare are essential for the organization's productivity and sustainability.



Loyalitas
Loyalty

Organisasi mengupayakan lingkungan kerja yang kondusif bagi staf untuk belajar, tumbuh dan produktif dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan kewajiban untuk membangun keterikatan dan kesetiaan staf terhadap organisasi. Staf berupaya untuk menjaga wibawa, kepentingan dan mandat organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Staf mengetahui posisi organisasi dalam seluruh kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi dan mendukung kerja-kerja advokasi tersebut. Staf harus melakukan segala upaya untuk mempromosikan kepentingan yang baik bagi organisasi.

The organization aims to cultivate a conducive work environment that fosters learning, growth, and productivity among staff. It recognizes that investing in human resources is crucial for enhancing staff engagement and loyalty. Employees are expected to uphold the organization's authority, interests, and mandate in their work. They are aware of the organization's position in all advocacy efforts and support this mission. Staff are encouraged to make every effort to advance the organization's best interests.



Disiplin
Discipline

Organisasi menegakkan kedisiplinan dengan menetapkan kebijakan secara transparan dan mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran. Proses akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Semua staf mematuhi dan menyesuaikan diri dengan petunjuk dan peraturan organisasi, baik dengan maupun tanpa pengawasan. Jika terjadi pelanggaran dan perselisihan, seluruh staf harus menjaga itikad baik untuk mencari jalan keluar dan solusi yang baik bagi kepentingan bersama.

The organization enforces discipline by transparently establishing policies and taking action in response to violations. This process is conducted openly and with accountability. All staff are expected to adhere to organizational instructions and regulations, whether under supervision or not. In cases of violations and disputes, all staff are required to act in good faith to find reasonable solutions that serve the common good.



Inklusif
Inclusive

Organisasi berkomitmen untuk menjadi lembaga yang inklusif dan mandiri dalam lingkup kerja civil society organization. Dengan demikian, organisasi memastikan posisi dan arah strategis organisasi akan

The organization is committed to fostering an inclusive and independent institution within the realm of civil society organizations. It ensures that its strategic position and direction prioritize national

mengutamakan persatuan bangsa dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Seluruh staf dan organisasi turut bersikap penuh toleran terhadap perbedaan dalam dan di luar organisasi. Dalam perbedaan pendapat, semua staf dan organisasi harus saling menghormati dan santun dalam mengupayakan terjadinya dialog antar pribadi.

unity and nationalism toward Indonesian. All staff and the organization are encouraged to promote tolerance for differences both within and outside the organization. When differences of opinion arise, all are expected to respect one another and engage in polite interpersonal dialogue.



Partisipatif Participative

Organisasi berkomitmen untuk mendorong lingkungan kerja yang partisipatif dengan landasan bahwa semua pihak memiliki kapasitas dan tekad untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi, pendekatan partisipatif akan diupayakan. Pendekatan ini turut diterapkan dalam relasi eksternal organisasi dengan pihak lainnya, termasuk donor, pemerintah, parlemen, rekan OMS, akademisi, dan ahli lainnya.

The organization is dedicated to fostering a participatory work environment where all stakeholders are empowered and motivated to contribute to its advancement. A participatory approach will be embraced in planning, decision-making, implementation, monitoring, and evaluation. This inclusive approach also extends to the organization's external relations with other stakeholders, including donors, government agencies, parliament, civil society organizations (CSOs) partners, academics, and other experts.



Anti korupsi Anti-corruption

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk menegakkan etika antisuap dan antikorupsi dalam kebijakan organisasi, baik secara keuangan maupun relasi organisasi.

As a demonstration of transparency and accountability, the organization is committed to upholding anti-bribery and anti-corruption ethics in its policies, both financially and in its organizational relations.

Hubungan antara The PRAKARSA dan staf ditopang oleh nilai-nilai organisasi kami yaitu keadilan dan kesejahteraan, integritas, loyalitas, disiplin, inklusif, partisipatif dan anti korupsi serta dipandu standar perilaku dan etika yang ditetapkan dalam pelaksanaan program. Nilai-nilai ini secara teratur dikomunikasikan melalui rapat, pertemuan, kegiatan pelatihan, dan berbagai kegiatan eksternal yang dipimpin oleh tim manajemen, serta didukung oleh mekanisme whistleblower yang menyediakan berbagai saluran rahasia dan aman bagi staf untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai organisasi.

Komitmen kami terhadap keberlanjutan tertanam dalam strategi The PRAKARSA, yang memberikan arahan strategis jangka panjang berlandaskan tujuan mulia, relevan dan mampu bersaing untuk masa depan bagi The PRAKARSA. Strategi ini berdasar pada keyakinan utama kami bahwa produk pengetahuan yang ditunjang oleh

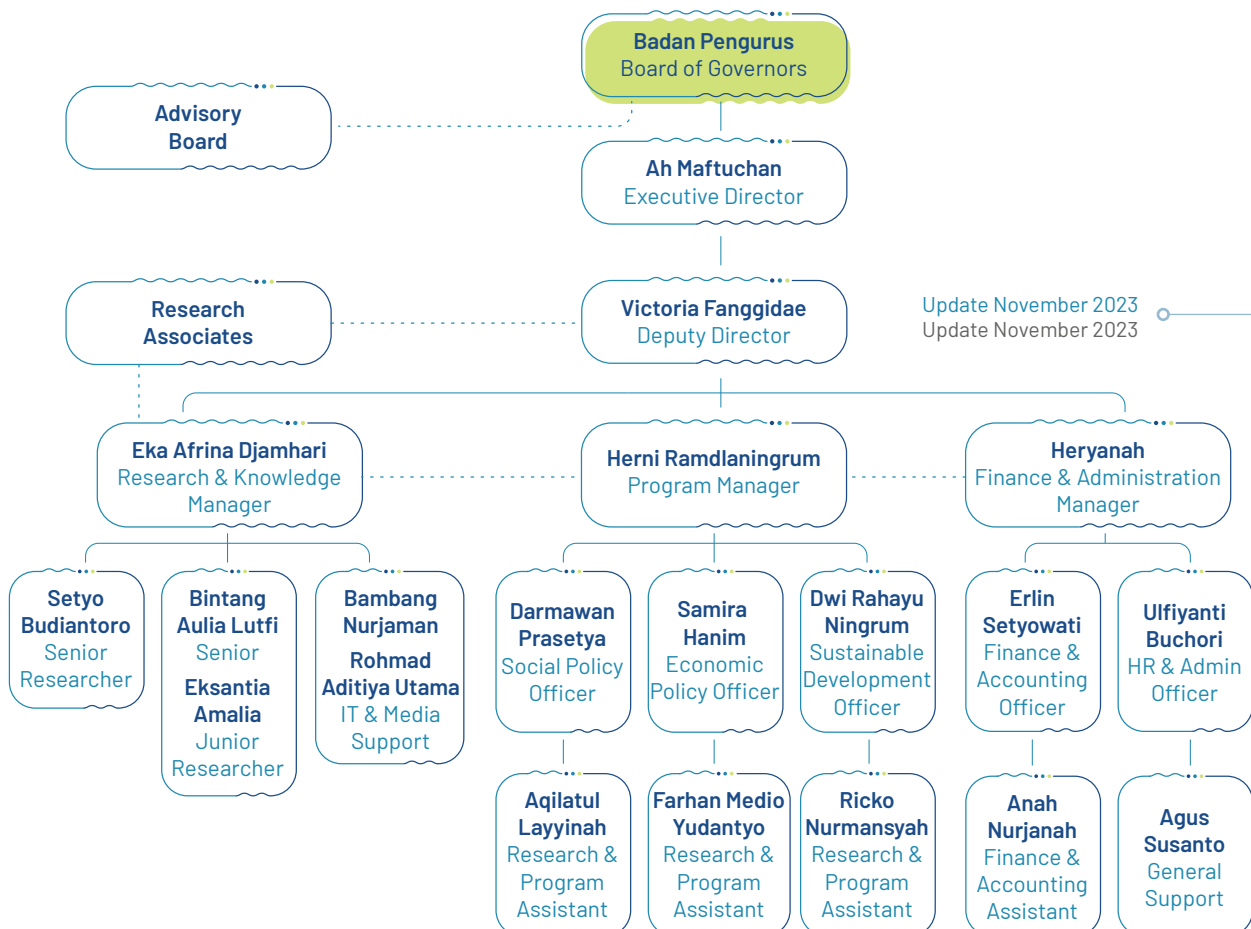


kinerja staff yang baik akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Untuk memastikan bahwa visi, misi, strategi dan nilai organisasi dapat dipahami dan diinternalisasi dengan baik, maka manajemen terus melakukan berbagai upaya penguatan dan pengembangan.

The relationship between The PRAKARSA and its staff is strengthened by organizational values such as justice, prosperity, integrity, loyalty, discipline, inclusiveness, participation, and anti-corruption measures. These values guide behavioural and ethical standards in program implementation and are regularly communicated through meetings, gatherings, training activities, and various external events led by the management team. Additionally, a whistleblower mechanism is in place to provide confidential and secure channels for staff to report violations of the organization's values.

Our commitment to sustainability is embedded in The PRAKARSA's strategy, which outlines a long-term strategic direction based on noble goals, relevance, and competitiveness for the organization's future. This strategy is founded on the belief that knowledge products, supported by strong staff performance, will enhance organizational resilience and sustainability. Management continually undertakes various strengthening and development efforts to ensure that the organization's vision, mission, strategy, and values are well understood and internalized by all stakeholders.

Struktur Organisasi Organizational Structure



 **Badan Pengurus Harian**
Executive Leadership Team



Maftuchan menjabat sebagai Direktur Eksekutif The PRAKARSA sejak 2015 hingga sekarang. Sejak 2021, Maftuchan sedang menjalankan kuliah jenjang doktoral bidang kesejahteraan sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia. Maftuchan mendapatkan gelar magister kesejahteraan sosial (M.Kesos) dari universitas yang sama. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Maftuchan bekerja di the GIZ/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, sebagai konsultan ahli bidang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai praktisi pembangunan dan pengamat kebijakan publik, Maftuchan sering menjadi narasumber dan memberikan layanan konsultasi kepada pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan swasta, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Maftuchan memiliki minat pada isu *social policies*, *fiscal policies* dan *sustainable development*.

Maftuchan has been serving as the Executive Director of The PRAKARSA since 2015. Since 2021, he has been pursuing doctoral studies in Social Welfare at the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Indonesia. Prior to this, he obtained a Master's degree in Social Welfare (M.Kesos) from the same university. Before joining The PRAKARSA, Maftuchan worked as an expert consultant in good governance at GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). As a development practitioner and public policy observer, he frequently serves as a resource person and offers consulting services to governments, civil society organizations, and private companies both in Indonesia and abroad. His areas of interest include social policies, fiscal policies, and sustainable development.



Victoria menjabat sebagai Deputy Direktur di The PRAKARSA sejak akhir tahun 2021. Ia memiliki gelar doktor dalam bidang *Social Policy, Sociology and Social Theory* pada *School of Social and Political Sciences (SSPS)* di Faculty of Arts, di University of Melbourne Australia. Ia juga mendapatkan gelar master's in development studies dari universitas yang sama. Sebelum di The PRAKARSA, Victoria bekerja sebagai staf dan konsultan di berbagai lembaga internasional di Indonesia seperti UNFPA, ILO, Oxfam dan UN-WFP untuk isu pembangunan sosial dan kemanusiaan, dan magang pada lembaga advokasi *Global Poverty Project* di Melbourne. Victoria berpengalaman dalam mengelola proyek dari berbagai



donor internasional dan dalam mengkoordinir berbagai riset yang dilakukan PRAKARSA serta memastikan proses kendali mutu produk tulisan The PRAKARSA seperti laporan riset, *policy brief* dan buku. Minat riset Victoria adalah kebijakan sosial, khususnya jaminan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan publik.

Victoria has been serving as the Deputy Director at The PRAKARSA since late 2021. She holds a Doctorate in Social Policy, Sociology, and Social Theory from the School of Social and Political Sciences (SSPS) in the Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia. Additionally, she obtained a Master's degree in Development Studies from the same university. Before joining The PRAKARSA, Victoria worked as a staff member and consultant for various international organizations in Indonesia, including UNFPA, ILO, Oxfam, and UN-WFP, focusing on social, humanitarian and overall development issues. She also interned at the Global Poverty Project advocacy organization in Melbourne. Victoria has extensive experience managing projects funded by various international donors, coordinating research conducted by The PRAKARSA, and ensuring the quality control processes for materials produced by the organization, such as research reports, policy briefs, and books. Her research interests include social policy, with a particular focus on social security, employment, and public health.

Herni Ramdhaningrum
Program Manager



Herni bergabung di The PRAKARSA sejak 2018 sebagai Program Manager. Herni memperoleh gelar master di bidang Kebijakan Publik dengan spesialisasi Kebijakan Sosial dari *The Australian National University (ANU)*. Sebelum bergabung di The PRAKARSA, Herni berpengalaman sebagai *Project Management Unit Specialist* di UNDP, bertanggungjawab memberikan dukungan analisis dan operasional proyek, memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut yang efektif dan mendukung koordinasi kegiatan yang dilaksanakan dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). Selain itu, Herni juga pernah bekerja sebagai *Community Outreach and Empowerment Leader* di *Zoological Society of London (ZSL)*, sebuah lembaga konservasi di bawah pemerintah kerajaan Inggris. Herni memiliki minat dan menggeluti isu GEDSI, kebijakan sosial, keuangan berkelanjutan dan pajak berkeadilan. Bidang keahlian yang dimiliki Herni adalah penelitian, fasilitasi partisipatif, lobby, dan advokasi kebijakan.

Victoria has been serving as the Deputy Director at The PRAKARSA since late 2021. She holds a Doctorate in Social

Policy, Sociology, and Social Theory from the School of Social and Political Sciences (SSPS) in the Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia. Additionally, she obtained a Master's degree in Development Studies from the same university. Before joining The PRAKARSA, Victoria worked as a staff member and consultant for various international organizations in Indonesia, including UNFPA, ILO, Oxfam, and UN-WFP, focusing on social, humanitarian and overall development issues. She also interned at the Global Poverty Project advocacy organization in Melbourne. Victoria has extensive experience managing projects funded by various international donors, coordinating research conducted by The PRAKARSA, and ensuring the quality control processes for materials produced by the organization, such as research reports, policy briefs, and books. Her research interests include social policy, with a particular focus on social security, employment, and public health.



Eka Afrina Djamhari
Research and
Knowledge Manager

Eka merupakan Manajer Penelitian dan Pengetahuan The PRAKARSA periode 2022 – sekarang. Eka menyelesaikan program Magister Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia. Sebelum bekerja di The PRAKARSA pada 2016, Eka memiliki pengalaman sebagai konsultan di berbagai lembaga pemerintahan, NGO lokal dan internasional, serta sektor swasta yang bekerja di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan hidup. Eka tertarik untuk meneliti isu-isu terkait kebijakan dan fenomena sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan dan ketimpangan. Eka juga kerap mengkritisi dan memberikan opsi-opsi perbaikan kebijakan melalui dialog dan publikasi media.

Eka has been serving as The PRAKARSA's Research and Knowledge Manager since 2022. She completed her Master's degree in Social Welfare at the University of Indonesia. Before joining The PRAKARSA in December 2016, Eka gained experience as a consultant for various government agencies, local and international NGOs, and the private sector, focusing on social, educational, health, humanitarian, and environmental issues. Eka is interested in researching topics related to policy and social phenomena, such as poverty and inequality. She often critiques and provides recommendations for policy improvement through dialogue and media publications.



Heryanah
Finance and
Administration
Manager



Heryanah adalah *Finance & Administration Manager* di The PRAKARSA sejak 2018 - sekarang. Heryanah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banda Aceh. Sebelum di The PRAKARSA, Heryanah bekerja di NGO International dan beberapa NGO lokal dengan bidang pekerjaan yang semuanya berhubungan dengan masalah keuangan. Heryanah memiliki pengalaman dalam proses audit, baik audit organisasi maupun audit proyek, melakukan perbaikan regulasi keuangan beserta dokumen-dokumen internal yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan keuangan. Heryanah saat ini sedang aktif melakukan pendampingan keuangan dari konsultan terkait masalah perpajakan.

Heryanah has been the Finance & Administration Manager at The PRAKARSA since 2018. She completed her Bachelor of Economics in Management at the Indonesian College of Economics in Banda Aceh. Before joining The PRAKARSA, Heryanah worked at an international NGO and several local NGOs, focusing on financial matters. She is experienced in the audit process, including both organizational and project audits, and has worked on improving financial regulations and internal documents used as supporting materials in financial reports. Currently, Heryanah actively provides financial assistance to consultants regarding tax issues.

Ulfyanti Buchori
HR & Administration
Officer



Ulfi menjabat sebagai *Human Resource and Administration Officer* periode 2022 sampai dengan saat ini. Ulfi menyelesaikan program Sarjana Manajemen dengan fokus sumber daya manusia (SDM) di Universitas Pamulang. Sebelum di The PRAKARSA, Ulfi menjabat sebagai Human Resource di private sector selama tujuh tahun bidang telekomunikasi, berkolaborasi dengan Universitas Telkom, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), dan sekolah-sekolah untuk menyerap tenaga kerja dan pemenuhan SDM yang berkualitas. Selain menjalankan peran sebagai Human Resource, Ulfi juga aktif mengelola unit usaha lembaga yang saat ini telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia. Keterlibatannya mencerminkan komitmen terhadap pengembangan organisasi, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia maupun peningkatan kemandirian lembaga melalui unit usaha strategis.

Ulfi serves as the Human Resource and Administration Officer from 2022 to the present. She completed her Bachelor's degree in Management with a focus on Human Resources at Pamulang

University. Prior to joining The PRAKARSA, Ulfi held a Human Resource position in the private sector for seven years in the telecommunications field, collaborating with Telkom University, the Center for Work Training Development (BBPLK), and various schools to absorb the workforce and meet the demand for quality human resources. In addition to her role as Human Resource Officer, Ulfi is also actively managing the organization's business unit, which has currently established a partnership with the Institute for Social and Political Research and Development (LPPSP) at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia. Her involvement reflects a commitment to organizational development, both in terms of human resource management and enhancing the institution's independence through strategic business units.



Awan merupakan *Officer* kebijakan sosial di The PRAKARSA sejak tahun 2022. Awan menyelesaikan pendidikannya pada program Kebijakan Kesejahteraan dan *Management* di Lund University, Swedia. Awan memiliki ketertarikan pada isu jaminan sosial, perlindungan sosial, GEDSI, pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan yang inklusif. Awan juga tergabung dalam beberapa proses advokasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional pada isu kebijakan sosial. Selama di The PRAKARSA, Awan terlibat dalam penelitian tentang isu ketenagakerjaan yang inklusif, kemiskinan multidimensi, rantai pasok global yang berkeadilan, dan jaminan kesehatan. Awan juga aktif berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah di beberapa media seperti *The Conversation*, *East Asia Forum*, *The Jakarta Post*, dan *Vice*.

Awan has been a Social Policy Officer at The PRAKARSA since 2022. He completed his Master's in Welfare Policy and Management at Lund University, Sweden. His areas of interest include social security, social protection, gender equality and social inclusion (GEDSI), poverty alleviation, and inclusive employment. Awan is actively involved in several advocacy processes concerning local, national, and international social policy issues. During his tenure at The PRAKARSA, he has conducted research on topics such as inclusive employment, multidimensional poverty, equitable global supply chains, and health insurance. He also contributes significantly to scientific articles published in various media outlets, including *The Conversation*, *East Asia Forum*, *The Jakarta Post*, and *Vice*.



Dwi Rahayu Ningrum
Sustainable
Development Officer



Dwi mulai bergabung di PRAKARSA sejak 2015 dan sejak 2021 ia dipercaya sebagai Officer Kebijakan *Sustainable Development*. Dwi menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang pada program studi Agribisnis dan sedang menempuh studi S2 dalam bidang Kebijakan Publik dengan fokus pada Kebijakan *Climate Change* di UIII. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Dwi terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian kampus dengan topik penelitian terkait ekonomi pertanian. Dwi tertarik pada isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, kesetaraan *gender*, serta bisnis dan hak asasi manusia. Dwi terlibat dalam advokasi kebijakan terkait isu-isu tersebut, terutama lewat jaringan CSO Koalisi Responsibank Indonesia yang dikoordinir The PRAKARSA dan Fair Finance Asia. Dwi aktif dalam riset-riset terkait praktik pembiayaan perbankan di sektor ekstraktif, pembiayaan perubahan iklim hingga inklusi keuangan. Selain itu, Dwi juga terlibat dalam riset kemiskinan multidimensi, aliran keuangan gelap, perdagangan rokok ilegal, dan sebagainya.

Dwi joined PRAKARSA in 2015 and has been serving as a Sustainable Development Policy Officer since 2021. She completed her Bachelor's degree in Agribusiness at Brawijaya University in Malang and is currently pursuing a Master's degree in Public Policy, focusing on Climate Change Policy at UIII. Prior to her work at The PRAKARSA, Dwi engaged in various campus research activities related to agricultural economics. She is interested in sustainability issues such as climate change, just energy transition, gender equality, and business and human rights. Dwi is involved in policy advocacy on these issues, particularly through the CSO Coalition for Responsible Banking in Indonesia, coordinated by The PRAKARSA and Fair Finance Asia. She actively participates in research related to banking practices in the extractive sector, climate financing, and financial inclusion. Additionally, Dwi is engaged in research on multidimensional poverty, illicit financial flows, illegal tobacco trade, and etc.

Samira Hanim
Economic Policy
Officer



Samira merupakan Officer kebijakan ekonomi di The PRAKARSA pada periode 2022 - sekarang. Samira menyelesaikan program Sarjana dan Magister Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya Malang. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Samira memiliki pengalaman bekerja sebagai konsultan keuangan di berbagai perusahaan swasta yang bergerak di sektor keuangan dan manajemen investasi. Samira berpengalaman melakukan penelitian kuantitatif di bidang manajemen keuangan. Samira memiliki ketertarikan untuk mendalami isu-isu terkait manajemen

keuangan, manajemen investasi, kebijakan ekonomi, dan kebijakan perpajakan. Samira juga aktif tergabung dalam koalisi perpajakan di Indonesia sebagai anggota dari Forum Pajak Berkeadilan Indonesia dan juga dalam jaringan koalisi Asia yaitu sebagai anggota dalam *Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA)*.

Samira is an Economic Policy Officer at The PRAKARSA, serving since 2022. She holds Bachelor's and Master's degrees in Business Administration from Brawijaya University in Malang. Before joining The PRAKARSA, Samira worked as a financial consultant for various private companies in the finance and investment management sectors. She has experience in conducting quantitative research in financial management. Samira is keen to delve into issues related to financial management, investment management, economic policy, and tax policy. She is also actively involved in the tax coalition in Indonesia as a member of the Indonesian Fair Tax Forum and in the Asian coalition as a member of Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA).

Yuanda P. Harahap
LCDI Project
Coordinator



Yuanda merupakan Project Coordinator untuk proyek *Low Carbon Development Initiative (LCDI)* di The PRAKARSA sejak tahun 2024. Ia memiliki gelar Sarjana Pertanian dari IPB dan gelar Master dari UGM serta University of Agder, Norwegia, dengan fokus pada *sustainability management*. Sebelumnya, Yuanda memiliki lebih dari lima tahun pengalaman sebagai Sustainability Supervisor dan Project Management Lead di sektor swasta, serta terlibat dalam riset mengenai child labor dan deforestasi di beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet dan kakao. Di The PRAKARSA, ia berkontribusi pada penyusunan *Grand Design* Peta Jalan Ekonomi Hijau Indonesia dan kajian penganggaran untuk inisiatif Pembangunan Rendah Karbon.

Yuanda has been the Project Coordinator for the Low Carbon Development Initiative (LCDI) at The PRAKARSA since 2024. He holds a Bachelor's degree in Agriculture from IPB and a Master's degree from UGM and the University of Agder, Norway, focusing on sustainability management. Previously, Yuanda had over five years of experience as a Sustainability Supervisor and Project Management Lead in the private sector, and he was involved in research on child labor and deforestation in various commodities such as palm oil, rubber, and cocoa. At The PRAKARSA, he contributes to the development of the Grand Design for Indonesia's Green Economy Roadmap and budgeting studies for the Low Carbon Development initiative.



Aqilatul Layyinah
Program and
Research Assistant



Aqila bergabung di The PRAKARSA sejak Oktober 2019 sebagai asisten program dan riset divisi kebijakan sosial. Aqila menyelesaikan pendidikan sarjananya pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP, Universitas Indonesia. Aqila memiliki ketertarikan pada isu kesehatan, perlindungan sosial, kelanjutusiaan, ketenagakerjaan, disabilitas dan penanganan kemiskinan. Aqila juga tergabung dalam beberapa forum advokasi di tingkat nasional dan internasional seperti Forum Reformasi Jaminan Sosial (FORJamsos), Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut (KuMPUL), *Vaccine Access and Global Health working group* C20 Indonesia. Aqila terpilih sebagai salah satu fellow program ASCEND 2024 dari *the Institute for Global Tobacco Control (IGTC)* di bawah Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Aqila joined The PRAKARSA in October 2019 as a Program and Research Assistant in the social policy division. She completed her undergraduate education in Social Welfare at FISIP, Universitas Indonesia. Aqila has an interest in issues related to health, social protection, aging, employment, disability, and poverty alleviation. She is also involved in several advocacy forums at national and international levels, such as the Social Security Reform Forum (FORJamsos), the Coalition for Caring for the Elderly (KuMPUL), and the Vaccine Access and Global Health working group of C20 Indonesia. Aqila was selected as a fellow for the ASCEND 2024 program by the Institute for Global Tobacco Control (IGTC) under Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Farhan Medio
Yudantyo
Program and
Research Assistant



Farhan bergabung di The PRAKARSA sebagai Asisten Program dan Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Fiskal sejak 2022 - sekarang. Farhan menyelesaikan pendidikan program Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA pada November 2022, Farhan pernah bekerja sebagai staf evaluasi dan monitoring di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dengan fokus isu terkait kebijakan pengembangan regional. Selain itu, Farhan pernah menjadi Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) UGM dengan tugas utama yaitu membantu proyek penelitian serta mengelola program pelatihan. Farhan memiliki minat dan perhatian pada isu ekonomika pembangunan, khususnya terkait ketimpangan *gender* dan kemiskinan. Farhan memiliki pengalaman penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif.

Farhan has been a Program and Research Assistant focusing on Economic and Fiscal Policy at The PRAKARSA since 2022. He completed his undergraduate studies in Economics at the Faculty of Economics and Business (FEB) at Gadjah Mada University (UGM). Before joining The PRAKARSA in November 2022, Farhan worked as a monitoring and evaluation staff member at the National Development Planning Agency (Bappenas), focusing on regional development policy issues. Additionally, he served as a Research Assistant at the Center for Islamic Economics and Business Studies (PKEBS) at UGM, where his main responsibilities included assisting with research projects and managing training programs. Farhan has a keen interest in development economics, particularly regarding gender inequality and poverty, and he has experience in research using quantitative methods.

Ricko Nurmansyah
Program and
Research Assistant



Ricko merupakan Asisten Program dan Penelitian Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di The PRAKARSA sejak 2022. Ricko menyelesaikan pendidikan program Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Ricko memiliki pengalaman sebagai staff di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lembaga penelitian di bidang ekonomi dan sumber daya alam serta bertanggung jawab menyusun transisi ekonomi hijau. Ricko memiliki minat untuk meneliti isu-isu terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan dan proses transisi ekonomi hijau pada sektor moneter dan sektor riil dan terlibat dalam berbagai riset di The PRAKARSA terkait praktik pembiayaan sektor keuangan dan hak asasi manusia serta dampak lingkungannya.

Ricko has been a Program and Research Assistant for Sustainable Development Policy at The PRAKARSA since 2022. He completed his undergraduate studies in Economics at the Bogor Agricultural Institute (IPB). Before working at The PRAKARSA, Ricko gained experience as a staff member at the National Development Planning Agency (Bappenas) and in research institutions focusing on economics and natural resources, where he was responsible for drafting the green economy transition plan. Ricko is interested in researching sustainable development policy issues and the green economy transition processes in both the monetary and real sectors, and he is involved in various research projects at The PRAKARSA related to financial sector practices, human rights, and their environmental impacts



Setyo Budiantoro
Senior Researcher



Setyo Budiantoro adalah senior researcher di The PRAKARSA. Ia mendapatkan gelar masternya di bidang Ekonomi Pembangunan di *International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam* di Den Haag dan menyelesaikan program pelatihan Analisis Kemiskinan Multidimensi oleh Universitas Oxford dan Universitas George Washington. Ia juga adalah *MIT Sloan IDEAS Fellow 2024*. Saat ini ia memimpin Pilar Pembangunan Ekonomi di Seknas SDGs Indonesia di bawah Bappenas. Budi adalah penulis yang produktif dalam analisis kebijakan, artikel dan buku di berbagai media nasional dan regional.

Setyo Budiantoro is a senior researcher at The PRAKARSA. He earned his Master's degree in Development Economics from the International Institute of Social Studies (ISS) at Erasmus University Rotterdam in The Hague and completed a training program on Multidimensional Poverty Analysis by the University of Oxford and George Washington University. He is also a 2024 MIT Sloan IDEAS Fellow. Currently, he leads the Economic Development Pillar at Seknas SDGs Indonesia under Bappenas. Budi is a prolific writer on policy analysis, articles, and books in various national and regional media.

Nor Ismah
Senior Researcher



Nor Ismah adalah salah satu peneliti senior di The PRAKARSA. Ia menyelesaikan studi doktoral di *Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)* setelah sebelumnya memperoleh gelar MA dalam bidang Studi Asia Tenggara dari *School of Pacific and Asian Studies di University of Hawaii di Manoa, Amerika Serikat*. Penelitiannya berfokus pada bidang-bidang seperti Islam, produksi pengetahuan perempuan, dan media. Nor Ismah terpilih sebagai finalis *Gosling-lim 2023 dan Association of Asian Studies Postdoctoral Fellowship in Southeast Asian Studies*. Beasiswa bergengsi ini diselenggarakan di Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Michigan.

Nor Ismah is a senior researcher at The PRAKARSA. She completed her doctoral studies at Leiden University Institute for Area Studies (LIAS) after obtaining her MA in Southeast Asian Studies from the School of Pacific and Asian Studies at the University of Hawaii at Manoa, USA. Her research focuses on areas such as Islam, women's knowledge production, and media. Nor Ismah was selected as a finalist for the 2023 Gosling-lim and the Association of Asian Studies Postdoctoral Fellowship in Southeast Asian Studies. This prestigious fellowship is hosted at the Center for Southeast Asian Studies at the University of Michigan.

Andreas Darmega Sihotang
Senior Researcher



Andreas merupakan peneliti senior The PRAKARSA sejak 2023. Andreas mendapatkan gelar Ph.D. di *Truman School of Government and Public Affairs, University of Missouri di Columbia, US* dan *Master of Arts in Conflict Transformation* dari *Center for Justice and Peace, Eastern Mennonite University di Virginia*. Andreas memiliki minat penelitian pada isu terkait partisipasi publik, kinerja organisasi publik, analisis kebijakan, dan evaluasi program. Saat ini ia bekerja sebagai Assistant Professor pada *Clinton School of Public Service di University of Arkansas*. Sebelumnya, Andreas pernah bekerja untuk badan PBB dan organisasi nirlaba selama lebih dari 15 tahun dengan peran berbeda di bidang bantuan kemanusiaan, sensitivitas konflik dan pembangunan perdamaian, pembangunan internasional, dan advokasi kebijakan.

Andreas has been a senior researcher at The PRAKARSA since 2023. He received his Ph.D. from the Truman School of Government and Public Affairs at the University of Missouri in Columbia, USA, and holds a Master of Arts in Conflict Transformation from the Center for Justice and Peace at Eastern Mennonite University in Virginia. Andreas has research interests in issues related to public participation, public organization performance, policy analysis, and program evaluation. He currently works as an Assistant Professor at the Clinton School of Public Service at the University of Arkansas. Previously, Andreas worked for UN agencies and non-profit organizations for over 15 years in various roles in humanitarian assistance, conflict sensitivity, peacebuilding, international development, and policy advocacy.

Bintang Aulia Lutfi
Senior Researcher



Bintang saat ini menjabat sebagai peneliti The PRAKARSA sejak tahun 2023. Bintang menyelesaikan Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, Bintang telah aktif terlibat dalam riset ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah. Dia bekerja sebagai asisten riset dan surveyor, berkolaborasi dengan dosen dan mitra pemerintah untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi terkait dengan proyek-proyek penelitian. Bintang memiliki ketertarikan pada berbagai isu yang terkait dengan ekonomi, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat dan masalah keuangan. Di The PRAKARSA, Bintang terlibat dalam berbagai riset ekonomi, fiskal dan sosial, dengan penekanan pada metode kuantitatif.

Bintang currently serves as a researcher at The PRAKARSA since 2023. She earned her Master's degree in Islamic Economics from



Airlangga University. Before joining The PRAKARSA, Bintang actively participated in research on development economics and Islamic economics. She worked as a research assistant and surveyor, collaborating with faculty and government partners to collect data and analyze information related to research projects. Bintang is interested in various issues related to the economy, particularly concerning community welfare and financial matters. At The PRAKARSA, she is involved in various economic, fiscal, and social research, with an emphasis on quantitative methods.

Eksanti Amalia
Kusuma Wardhani
Researcher



Eksanti merupakan Peneliti Yuniior dari tahun 2024. Eksanti menyelesaikan pendidikan program Sarjana di bidang Manajemen dan Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Eksanti telah bekerja sebagai konsultan penelitian di Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Asia Tenggara pada isu perempuan dan pasar tenaga kerja. Eksanti juga menjadi konsultan penelitian di The PRAKARSA dengan membantu melaksanakan riset-riset di bidang ekonomi hingga pembangunan berkelanjutan. Selain menjadi konsultan penelitian, Eksanti juga pernah berkiprah di *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* sebagai peneliti magang di Departemen Politik dan Perubahan Sosial dengan fokus pada isu politik elektoral.

Eksanti has been a Junior Researcher at The PRAKARSA since 2024. She completed her Bachelor's degree in Management and Public Policy at the Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University. Before joining The PRAKARSA, Eksanti worked as a research consultant on women's and labor market issues at the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia. In her role at The PRAKARSA, she assists in conducting research in the fields of economics and sustainable development. Additionally, Eksanti has experience as an internship researcher at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in the Department of Politics and Social Change, where she focused on electoral political issues.



Bambang menjabat sebagai bagian dari tim The PRAKARSA sejak tahun 2018. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Informatika, Universitas MH. Thamrin. Sebelum bergabung dengan PRAKARSA, Bambang berpengalaman sebagai profesional IT dan graphic designer di berbagai institusi pendidikan dan swasta. Selain pendidikan formalnya, Bambang terus mengembangkan keterampilan kompetensinya melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan *User Interface (UI) & User Experience (UX)*, serta keterampilan social media marketing.

Bambang has been part of The PRAKARSA team since 2018. He obtained a Bachelor's degree from the Department of Informatics Engineering at MH Thamrin University. Before joining The PRAKARSA, Bambang gained experience as an IT professional and graphic designer in various educational and private institutions. In addition to his formal education, he continues to enhance his skills through various training programs, including User Interface (UI) and User Experience (UX) training, as well as social media marketing skills.



Adit bergabung di The PRAKARSA sebagai Staf Media dan Komunikasi sejak 2022. Aditya menyelesaikan pendidikannya di bidang Komunikasi dan Penyiaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia memiliki perhatian yang tinggi pada isu kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan demokrasi terutama yang berkaitan dengan media.

Adit joined The PRAKARSA as a Media and Communications Staff member in 2022. He completed his education in Communication and Broadcasting at Sunan Kalijaga State Islamic University in Yogyakarta. Adit has a strong interest in social welfare, environmental issues, and democracy, particularly as they relate to media.



Erlin Setyowati bekerja di The PRAKARSA sejak 2018 sebagai Finance & Accounting Officer. Ia lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelum bergabung, Erlin berpengalaman sebagai *finance* dan *accounting* di sektor swasta meliputi retail, manufaktur, dan properti. Erlin memiliki minat pada perpajakan nirlaba, khususnya yang berhubungan dengan NGO. Hingga kini ia telah mengikuti berbagai pelatihan perpajakan nirlaba untuk mendukung pengembangan organisasi.



Anah Nurjanah
Finance and
Accounting
Assistant



Erlin Setyowati has been working at The PRAKARSA since 2018 as a Finance & Accounting Officer. She holds a Bachelor's degree in Accounting from the National Development University "Veteran" Jakarta. Prior to joining, Erlin gained professional experience in finance and accounting within the private sector, covering retail, manufacturing, and property. She has a strong interest in nonprofit taxation, particularly related to NGOs, and has attended various training programs in nonprofit taxation to support organizational development.

Anah Nurjanah menjabat sebagai *Finance & Accounting Assistant* di The PRAKARSA sejak 2018. Anah menyelesaikan program Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Magister Akuntansi di universitas yang sama. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Anah pernah bekerja di salah satu bank BUMN, selain itu ia juga aktif dalam kegiatan dibidang sosial masyarakat. Anah berpengalaman dalam transaksi keuangan di dunia perbankan dan NGO. Selain itu, Anah juga aktif dalam komunitas perbankan dan sering memberikan update informasi peraturan terbaru perihal transaksi keuangan yang terkait dengan perbankan.

Anah Nurjanah has been a Finance & Accounting Assistant at The PRAKARSA since 2018. She obtained both her Bachelor's and Master's degrees in Accounting from Muhammadiyah University Jakarta. Before joining The PRAKARSA, Anah worked at a state-owned bank and was actively involved in social activities. She has experience in financial transactions in both the banking and NGO sectors. Additionally, Anah is active in the banking community and frequently shares updates on the latest regulatory information related to financial transactions.

Agus Susanto
General Support

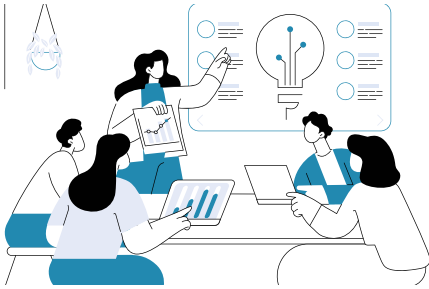


Agus bergabung dengan The PRAKARSA sejak 2008 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan selama sepuluh tahun. Agus mendukung kebutuhan administrasi di dalam atau di luar kantor untuk semua kegiatan dalam The PRAKARSA.

Agus joined The PRAKARSA Association in 2008 after spending ten years at a consulting company. He provides administrative support for both internal and external activities within the PRAKARSA Association, ensuring smooth operations across all initiatives.



Internship dan Praktikum Practical Training




Pada tahun 2024, The PRAKARSA kembali berperan aktif dalam mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa melalui program praktikum dan magang. Program ini merupakan bagian integral dari kemitraan strategis dengan perguruan tinggi. Selain menjadi wadah pembelajaran praktis bagi mahasiswa, program ini sejalan dengan visi kami untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan bagi semua pemangku kepentingan.

In 2024, The PRAKARSA actively continued its role in supporting the capacity development of students through internship and practical training programs. These programs are an integral part of our strategic partnership with higher education institutions. In addition to serving as a platform for practical learning for students, these initiatives align with our vision to facilitate capacity building, education, and training for all stakeholders.




Pada periode Februari hingga Juni 2024, terdapat dua orang mahasiswi program praktikum dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia:

From February to June 2024, we hosted two female students from the Social Welfare Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) at Universitas Indonesia:



Intan Hestiana Putri , mahasiswi semester 6
Intan Hestiana Putri, 6th-semester student



Ireyne Seftania Glorya M., mahasiswi semester 6
Ireyne Seftania Glorya M., 6th-semester student




Pada periode Juni hingga Desember 2024, kami menjadi mitra dalam program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).


From June to December 2024, we became partners in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) internship program with the Sociology Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY):



Giza Afif M. , mahasiswa semester 6
Giza Afif M. , 6th-semester student



Liona Anggie F. , mahasiswi semester 7
Liona Anggie F. , 7th-semester student



Siti Hasna Rafifa, mahasiswi semester 7
Siti Hasna Rafifa, 7th-semester student



Badan Pengurus
Board of Governors



Purnama Adil Marata
Ketua
Chairperson



Ati Nurbaeti
Sekretaris
Secretary



Binny Buchori
Bendahara
Treasurer



Sugeng Bahagijo
Anggota
Member



Yuyun Isnawati
Anggota
Member



Dr. M. Hanif Dhakiri
Anggota
Member





Asisten Peneliti
Research Associates



Prof. Hasbullah Thabrany
Universitas Indonesia (UI)



Prof. Andrew Rosser
University of Melbourne



Edi Suharto, Ph.D
STKS



Poppy Ismalina, Ph.D
Universitas Gadjah Mada



A Prasetyantoko, Ph.D
Universitas Atma Jaya



Fachru Novrian, Ph.D
UPN Jakarta



Dr Arie Sujito
Universitas Gadjah Mada



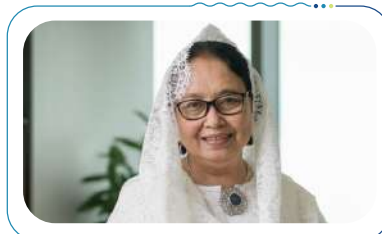
**Ass. Prof. Zulfan
Tadjoeddin, Ph.D**
Western Sydney
University



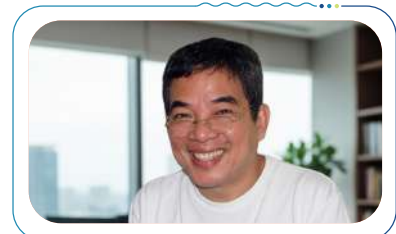
Dr Fajar Luhur Martha
Litbang Kompas



Badan Penasehat
Advisory Board



Zumrotin K. Susilo



Filomeno Sta. Ana III



Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Development



Sebagai organisasi yang terus tumbuh, kami juga berkomitmen tumbuh bersama dengan Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi. Kami berupaya terus membangun kapabilitas staf melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, termasuk dalam hal digitalisasi dan inovasi. Kami juga berupaya meningkatkan kompetensi dari para mitra *Civil Society Organization (CSO)* atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendukung ekosistem organisasi. Ini menunjukkan prinsip kami untuk menjalankan organisasi secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap publik.

Pada tahun 2024, secara internal organisasi kami memfasilitasi sebanyak 13 pelatihan kepada staf program dan support. Pelatihan antara lain mengenai pengembangan riset, kampanye publik dan media, monitoring dan evaluasi program, perpajakan dan standar keuangan, serta pelatihan pengembangan organisasi seperti pengembangan mekanisme safeguarding dan anti korupsi.

Selain pelatihan yang dilaksanakan dengan pelibatan narasumber eksternal, kami juga secara rutin menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM melalui sharing knowledge internal. Sharing knowledge dapat dilakukan bukan hanya oleh pihak di luar organisasi tetapi juga antar staf dalam The PRAKARSA, dengan tema yang beragam. *Sharing knowledge* yang dilakukan pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 7 kali. Isu-isu yang dibahas antara lain mengenai

As a growing organization, we are committed to developing our human resources (HR). We continuously strive to enhance staff capabilities through various training and education programs, particularly in the areas of digitalization and innovation. Additionally, we aim to improve the competencies of our partners in Civil Society Organizations (CSOs) to support the organizational ecosystem. This reflects our principle of operating sustainably and contributing to the public good.

In 2024, our organization facilitated a total of 13 internal training sessions for program and support staff. These sessions covered topics such as research development, public campaigning and media, program monitoring and evaluation, taxation and financial standards, as well as organizational development training, including safeguarding mechanisms and anti-corruption strategies.

In addition to training conducted with external resource persons, we regularly organize capacity-building sessions through internal knowledge sharing. These sessions can be facilitated not only by external parties but also by staff members within The PRAKARSA, covering a diverse range of themes. In 2024, we conducted knowledge-sharing sessions seven times. The topics discussed included research methods, policy analysis, sustainability

metode penelitian, analisis kebijakan, transformasi keberlanjutan, pengarusutamaan *gender*, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kepemimpinan.

Sejak tahun 2021, kami juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pendidikan staf melalui bantuan dana pendidikan dan keringanan dalam hal jam kerja. Pada tahun 2024, terdapat tiga orang staf yang melanjutkan pendidikan, dua staf untuk jenjang pendidikan S2 dan satu staf di tingkat S3.

Berkat semangat dan kerja keras seluruh staf, The PRAKARSA mampu membukukan kinerja yang baik pada tahun 2024, sehingga menjadi sebuah landasan yang baik untuk pertumbuhan kedepannya. Ini tidak terlepas dari komposisi badan pelaksana harian.

transformation, gender mainstreaming, occupational health and safety, and leadership.

Since 2021, we have also committed to supporting staff education through funding assistance and flexible working hours. In 2024, three staff members pursued further education, with two staff members enrolled in Master's programs and one in a Doctorate program.

Thanks to the enthusiasm and hard work of all staff, The PRAKARSA achieved strong performance in 2024, laying a solid foundation for future growth. This success is also attributed to the effective composition of the executive team.

 **Komposisi staf/ Badan Pelaksana Harian**
Composition of Staff/ Executive Leadership Team





Kesejahteraan Staf Staff Well-being

The PRAKARSA menjadikan kesejahteraan staf sebagai fokus utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kami menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna membangun organisasi, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan staf yang meliputi aspek fisik, emosional, dan mental. Pada tahun 2024, kami masih melanjutkan komitmen kami untuk mempertahankan keseimbangan antara kerja di kantor dan kerja dari rumah. Kami juga berkomitmen untuk mendukung staf agar dapat bekerja dengan sehat dan produktif, terutama bagi ibu yang memiliki anak.

Pada tahun 2024, organisasi kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan ganda bagi staf, keluarga, dan badan pengurus, termasuk penyediaan asuransi kesehatan tambahan selain kewajiban ketenagakerjaan seperti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di organisasi. Dengan memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung, sehingga staf dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif. Perlindungan ini mencerminkan perhatian kami terhadap kebutuhan dan kesejahteraan semua anggota organisasi, serta komitmen kami untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung.

The PRAKARSA prioritizes staff well-being as a central focus in human resource management. We implement strategies to enhance the quality of human resources to build the organization while also considering the physical, emotional, and mental well-being of our staff. In 2024, we continued our commitment to maintaining a balance between office work and remote work. We are also dedicated to supporting our staff in working healthily and productively, particularly for mothers with children.

In 2024, our organization is committed to providing dual protection for staff, their families, and the management team, including the provision of additional health insurance beyond mandatory employment programs such as BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. This initiative is part of our efforts to enhance the welfare of human resources within the organization. By offering supplementary health insurance, we hope to create a safer and more supportive work environment, enabling staff to work more calmly and productively. This protection reflects our concern for the needs and welfare of all members of the organization, as well as our commitment to fostering an inclusive and supportive work culture.



Kesetaraan Gender, Keberagaman Dan Inklusi Gender Equality, Diversity And Inclusion

The PRAKARSA adalah organisasi yang terbuka bagi semua orang, dan kami senantiasa berupaya untuk meningkatkan inklusivitas. Kami sangat mendukung kesetaraan *gender*, yang tercermin dalam pencapaian 100% representasi perempuan di level manajemen pada tahun 2024. Di tingkat Direksi, komposisi perempuan dan laki-laki seimbang, yaitu 50:50, dengan Direktur Eksekutif dijabat oleh laki-laki dan Deputy Direktur oleh perempuan. Secara keseluruhan komposisi perempuan di badan pelaksana harian adalah 52% dan 48% laki-laki. Hal ini menggambarkan upaya The PRAKARSA dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung inklusivitas.

Kami juga memiliki kebijakan untuk memenuhi kebutuhan khusus staf perempuan di The PRAKARSA. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang setara, kami mendukung staf perempuan melalui berbagai pengaturan yang sesuai, seperti waktu kerja fleksibel dan dapat bekerja lebih banyak dari rumah. Staf perempuan dengan anak berusia hingga dua tahun diberikan kelonggaran dalam durasi waktu kerja untuk mencapai 8 jam sehari, serta dapat mengajukan izin tambahan atau cuti untuk perawatan anak dan keadaan darurat lainnya. Dalam kegiatan pertemuan tatap muka, baik di dalam maupun luar kota, staf perempuan dapat didampingi oleh baby-sitter atau anggota keluarga. Kami juga menyediakan cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti untuk ayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami terus berkomitmen untuk mendukung kesempatan yang sama bagi semua orang serta mendorong keberagaman dalam hal usia, *gender*, budaya, agama, etnis, dan disabilitas. Meski demikian, kami menyadari masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam mendukung pekerja dengan disabilitas dan keragaman lainnya.

The PRAKARSA is an organization that is open to everyone, and we continually strive to enhance inclusivity. We strongly support gender equality, as reflected in achieving 100% representation of women in managerial positions in 2024. At the Board level, the composition of women and men is balanced at 50:50, with a male Executive Director and a female Deputy Director. Overall, the composition of women in the executive team is 52%, compared to 48% for men. This illustrates The PRAKARSA's efforts to create a working environment that supports inclusivity.

We also have policies in place to meet the specific needs of female staff at The PRAKARSA. In our efforts to create an equitable working environment, we support female staff through various appropriate arrangements, such as flexible working hours and the option to work more from home. Female staff with children up to two years old are granted flexibility in their working hours to achieve eight hours a day, as well as the ability to request additional leave for childcare and other emergencies. For in-person meetings, both locally and out of town, female staff may be accompanied by a babysitter or family member to help with the childcare. We also provide menstrual leave, maternity leave, and paternity leave in accordance with government regulations.

We remain committed to supporting equal opportunities for all and promoting diversity in terms of age, gender, culture, religion, ethnicity, and disability. However, we recognize that challenges still exist in implementing these initiatives, particularly in supporting workers with disabilities and other forms of diversity.





Sorotan Jejak Langkah Highlights of Our Journey

Dua dekade perjalanan The PRAKARSA meneguhkan komitmen pada kebijakan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dari riset hingga advokasi, PRAKARSA hadir sebagai aktor aktif yang mendorong perubahan nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Two decades of The PRAKARSA affirm its commitment to inclusive, just, and sustainable policies. Through research and advocacy, PRAKARSA stands as an active actor driving real change for society and the nation.







02

Sorotan Jejak Langkah
Highlights of Our Journey



Dua dekade perjalanan The PRAKARSA

Two Decades of The PRAKARSA's Journey



Pada tahun 2024, The PRAKARSA merayakan dua dekade perjalanan dalam memberikan kontribusi kebijakan inklusif bagi masyarakat pada 19 September 2024. Dalam momen bersejarah ini, kami menyerahkan *white paper* rekomendasi kebijakan kepada perwakilan pemerintah, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini memastikan suara kami, yang berbasis bukti dan pengetahuan, didengar oleh pemerintahan baru.

Rekomendasi yang kami sampaikan mendapat tanggapan positif dari Dr. Habiburokhman dan dr. Sumarjati Arjoso, yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Pakar Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah. Ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap masukan lembaga riset dan advokasi.

Proposal kebijakan untuk periode 2024-2029 mencakup tiga isu utama: kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor aktif dalam pembuatan kebijakan. Dengan pendekatan berbasis problem solving, kami berusaha mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang sering kali terpinggirkan.

Selama dua dekade terakhir, The PRAKARSA telah menunjukkan dedikasi dalam mendorong perubahan kebijakan yang adil melalui riset dan advokasi.

In 2024, The PRAKARSA celebrated two decades of contributing to inclusive policy for society on September 19, 2024. During this historic moment, we presented a white paper of policy recommendations to government representatives of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka's administration. This step ensured that our evidence-based and knowledge-driven voices were heard by this new administration.

The recommendations we submitted received positive feedback from Dr. Habiburokhman and Dr. Sumarjati Arjoso, who then conveyed them to Burhanuddin Abdullah, the Chair of the Prabowo-Gibran Expert Team. This reflects the government's recognition of the input from research and advocacy institutions.

The policy proposals for the 2024-2029 period encompass three main issues: social policy, fiscal policy, and sustainable development policy. We are committed not only to being observers but also to being active participants in policy-making. With a problem-solving approach, we aim to address the challenges faced by society, particularly for the poor and vulnerable groups that are often marginalized.

Over the past two decades, The PRAKARSA has demonstrated dedication to promoting equitable policy change through research and advocacy. Our

Kontribusi The PRAKARSA, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil telah menjadi pondasi penting dalam mencapai berbagai capaian strategis.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pendiri, pengurus harian, dan mitra lokal serta internasional yang berperan dalam memperkuat kapasitas dan visi The PRAKARSA. Kolaborasi lintas sektor yang telah dibangun selama ini menjadi pijakan kokoh bagi The PRAKARSA dalam mendorong reformasi kebijakan yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, The PRAKARSA berkomitmen untuk terus memperkuat perannya. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas internal dan kolaborasi lintas sektor, kami akan terus menghasilkan kebijakan yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dengan pijakan yang kokoh dari dua dekade pengalaman, kami siap berperan aktif dalam mendukung transformasi Indonesia menuju 2045. Dalam dua puluh tahun ke depan, kami akan terus memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing global. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, kami terus berupaya untuk menjadi penggagas ide-ide inovatif dan motor penggerak perubahan positif demi masa depan yang lebih baik bagi semua.

contributions reflect a commitment to enhancing social and economic welfare. Close collaboration with various stakeholders—from government and the private sector to civil society—has been a crucial foundation for achieving strategic milestones.

This success is attributed to the support of various parties, including founders, executive management, and local and international partners who have played a role in strengthening The PRAKARSA's capacity and vision. The cross-sector collaboration established over the years has provided a solid basis for The PRAKARSA to drive sustainable policy reform at both national and global levels.

Facing increasingly complex challenges ahead, such as climate change, social inequality, and economic sustainability, The PRAKARSA is committed to further strengthening its role. With a focus on enhancing internal capacity and cross-sector collaboration, we will continue to produce relevant policies that make a tangible impact on society, in line with the efforts towards the vision of Indonesia Gold 2045.

With a solid foundation built over two decades of experience, we are ready to play an active role in supporting Indonesia's transformation towards 2045. In the next twenty years, we will continue to make significant contributions to the creation of more inclusive, sustainable, and equitable public policies, in order to realize a prosperous and globally competitive Indonesia. With strong determination and commitment, we strive to be pioneers of innovative ideas and drivers of positive change for a better future for all.



● ● ● ——— ○ dr. Sumaryati Arjoso



The PRAKARSA Memperjuangkan Penerapan Pajak Kekayaan untuk Ekonomi yang Inklusif

The PRAKARSA Advocates for the Implementation of Wealth Tax for an Inclusive Economy



The PRAKARSA konsisten mendorong penerapan pajak kekayaan di tingkat global dan nasional sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem fiskal yang lebih adil dan inklusif.

The PRAKARSA consistently advocates for wealth taxation at both global and national levels as an instrument to achieve a fairer and more inclusive fiscal system.

The PRAKARSA terus berkomitmen untuk memperjuangkan penerapan pajak kekayaan untuk ekonomi yang inklusif. The PRAKARSA menyerukan agar pajak kekayaan dimasukkan dalam Konvensi Pajak pada pertemuan khusus *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* tentang *"International Cooperation in Tax Matters"* yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 18 Maret 2024.

Dalam pertemuan tersebut, The PRAKARSA menjadi satu-satunya pembicara dari organisasi masyarakat sipil serta perwakilan negara berkembang. Terdapat kebutuhan mendesak untuk pajak kekayaan global guna mengatasi kesenjangan dan mendanai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif

The PRAKARSA remains committed to advocating for the implementation of wealth tax to foster an inclusive economy. The organization calls for the inclusion of wealth tax in the Tax Convention at the special meeting of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) on "International Cooperation in Tax Matters," held at the United Nations Headquarters in New York on March 18, 2024.

During this meeting, The PRAKARSA was the representative from civil society organizations and developing countries. There is an urgent need for a global wealth tax to address inequality and fund the Sustainable Development Goals (SDGs). Ah Maftuchan, Executive Director of The PRAKARSA, highlighted the urgency of addressing wealth

The PRAKARSA, menyoroiti urgensi untuk mengatasi konsentrasi kekayaan dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa pajak kekayaan dapat berperan dalam mendorong perekonomian yang adil dan inklusif dengan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan akses yang adil terhadap sumber daya.

Maftuchan juga menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan pajak kekayaan untuk membiayai inisiatif pembangunan. Ia mengingatkan para peserta forum tentang konsensus global terkait pengenaan pajak atas penghasilan dan kekayaan orang-orang terkaya, sebagaimana diakui dalam Agenda Aksi Addis Ababa. Pada kesempatan ini, Maftuchan mendesak PBB, termasuk ECOSOC, untuk mendukung negara-negara dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif demi mengurangi kesenjangan melalui pajak kekayaan.

Keterlibatan The PRAKARSA dalam forum ini menunjukkan perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi perpajakan internasional, menandai pengakuan akan peran penting lembaga ini dalam kebijakan pajak global.

concentration and its detrimental socio-economic impacts on society. He emphasized that wealth tax can play a significant role in promoting a fair and inclusive economy by reducing disparities and enhancing equitable access to resources.

Maftuchan also underscored the importance of utilizing wealth tax to finance development initiatives. He reminded forum participants of the global consensus on imposing taxes on the income and wealth of the wealthiest individuals, as recognized in the Addis Ababa Action Agenda. On this occasion, Maftuchan urged the United Nation (UN), including ECOSOC, to support countries in building fairer and more progressive tax systems to reduce inequality through a wealth tax.

The involvement of The PRAKARSA in this forum represents a significant shift in civil society participation in international tax discussions, marking recognition of this institution's important role in global tax policy.



Di tingkat global, The PRAKARSA terlibat aktif dalam mendorong negara-negara G20 untuk menerapkan pajak kekayaan. Dalam upaya memperkuat advokasi ini, Direktur Eksekutif kami, Ah Maftuchan, bersama

At the global level, The PRAKARSA is actively involved in urging G20 countries to implement a wealth tax. To strengthen this advocacy, our Executive Director, Ah Maftuchan, with Binny Buchori from The PRAKARSA's



Binny Buchori dari Badan Pengurus The PRAKARSA, yang juga merupakan anggota *International Advisory Committee (IAC) C20 Brazil*, menghadiri *Midterm Meeting C20* yang berlangsung di Rio de Janeiro pada 1-2 Juli 2024.

Dalam pertemuan tersebut, agenda advokasi mengenai “pajak orang super kaya” dibahas secara serius. Isu ini telah dimasukkan dalam rekomendasi Kelompok Kerja Ekonomi Adil, Inklusif, dan Anti-Rasis C20. G20 Brazil menegaskan bahwa pajak kekayaan tetap menjadi prioritas, dengan proposal yang didasarkan pada makalah oleh Gabriel Zucman. Makalah tersebut, berjudul “*A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra-High-Net-Worth Individuals*,” telah dipresentasikan secara publik pada 25 Juni 2024.

Selain itu, sebagai upaya advokasi yang berkelanjutan The PRAKARSA juga mengadakan webinar bertajuk “*Taxing the Super-Rich: Fair Taxation Agenda at the G20 and Beyond*” pada 11 Desember 2024. Diskusi ini merupakan bagian dari partisipasi The PRAKARSA dalam G20. Partisipasi perwakilan *multi-millionaires* dari Swedia dalam diskusi yang menjadi sinyal positif dalam mengkampanyekan keterlibatan individu berpenghasilan tinggi (HNWI) dalam proses advokasi pajak kekayaan.

Supervisory Board, who is also a member of the International Advisory Committee (IAC) of C20 Brazil, attended the C20 Midterm Meeting held in Rio de Janeiro on July 1-2, 2024.

During this meeting, the advocacy agenda regarding the “super-rich tax” was discussed in depth. This issue has been incorporated into the recommendations of the C20 Working Group on Fair, Inclusive, and Anti-Racist Economics. G20 Brazil reaffirmed that wealth tax remains a priority, with proposals based on a paper by Gabriel Zucman. This paper, titled “*A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra-High-Net-Worth Individuals*,” was published on June 25, 2024.

Additionally, as part of ongoing advocacy efforts, The PRAKARSA hosted a webinar titled “*Taxing the Super-Rich: Fair Taxation Agenda at the G20 and Beyond*” on December 11, 2024. This discussion is part of The PRAKARSA’s participation in the G20. The involvement of representatives of multi-millionaires from Sweden in the discussion serves as a positive signal in campaigning for the engagement of high-net-worth individuals (HNWI) in the wealth tax advocacy process.





The PRAKARSA tidak hanya berfokus pada advokasi pajak kekayaan di tingkat global, tetapi juga secara aktif menyampaikan gagasan di tingkat nasional. Penerapan pajak kekayaan dapat menjadi alternatif untuk mobilisasi sumber pendanaan yang lebih beragam bagi pembangunan, terutama dalam situasi krisis.

Pada 12 Desember 2024, The PRAKARSA menyampaikan pandangannya kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Edhie Baskoro Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, The PRAKARSA menekankan tantangan yang dihadapi dalam sistem fiskal Indonesia. Kami mengusulkan agar batas defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ditinjau ulang, agar memberikan kelonggaran dalam mobilisasi sumber pendanaan untuk pembangunan.

Selain itu, The PRAKARSA juga menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk mengadopsi pajak kekayaan sebagai instrumen dalam meningkatkan kontribusi dari kalangan super kaya. Isu ini telah mulai didiskusikan di tingkat kementerian teknis, menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang mengenai perlunya kebijakan yang lebih progresif dalam sistem perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, The PRAKARSA berkomitmen untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

The PRAKARSA is not only focused on advocating for wealth tax at the global level but is also actively communicating ideas at the national level. The implementation of a wealth tax can serve as an alternative for mobilizing a more diverse funding source for development, especially in times of crisis.

On December 12, 2024, The PRAKARSA presented its views to the Vice Chairman of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR-RI), Edhie Baskoro Yudhoyono. In this meeting, The PRAKARSA emphasized the challenges faced within Indonesia's fiscal system. We proposed a review of the budget deficit limit of 3% of Gross Domestic Product (GDP) to allow for greater flexibility in mobilizing funding sources for development.

Furthermore, The PRAKARSA highlighted the importance of the Indonesian government adopting a wealth tax as an instrument to enhance contributions from the super-rich. This issue has begun to be discussed at the technical ministry level, indicating a growing awareness of the need for more progressive policies within the tax system. Through these initiatives, The PRAKARSA is committed to promoting a fairer and more sustainable fiscal policy for the welfare of society.



Dampak Advokasi Pajak Kekayaan pada Kebijakan Nasional Impact of Wealth Tax Advocacy on National Policy

Advokasi pajak kekayaan telah memberikan dampak signifikan pada kebijakan nasional, terutama dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, 2024, dan 2025. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.

Advocacy for wealth tax has had a significant impact on national policy, particularly in the context of the State Budget (APBN) for 2023, 2024, and 2025. These steps demonstrate the government's commitment to creating a fairer and more effective tax system.

Dukungan Kebijakan Pajak dalam APBN 2023 mencakup sejumlah inisiatif penting, antara lain:

Policy Support for Taxation in the APBN 2023 includes several important initiatives:

Implementasi aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ini termasuk integrasi data perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengumpulan pajak.

Implementation of derivative regulations of the Tax Harmonization Law (UU HPP), includes the integration of tax data aimed at improving transparency and accuracy in tax collection.

Penguatan basis pemajakan dengan fokus pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui reformasi yang mencakup sumber daya manusia, organisasi, dan proses bisnis.

Strengthening the tax base focused on enhancing taxpayer compliance through reforms that encompass human resources, organization, and business processes.

Reformasi pengawasan dan penegakan hukum dengan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak.

Reform of oversight and law enforcement with strengthening oversight mechanisms to ensure tax compliance.

Insentif pajak yang terarah dan terukur, dengan memberikan kriteria yang jelas dan terukur bagi wajib pajak untuk mendorong kepatuhan dan investasi.

Targeted and measurable tax incentives with clear and measurable criteria for taxpayers to encourage compliance and investment.




Kebijakan teknis dalam APBN 2024 mencakup:

Technical policies in the APBN 2024 include:

- Tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS), ini termasuk implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mempermudah pengelolaan data perpajakan.
- Ekstensifikasi Wajib Pajak *High Wealth Individual (HWI)* dengan memperluas cakupan pemungutan pajak dengan menargetkan individu berpenghasilan tinggi dan transaksi afiliasi dalam ekonomi digital.
- Implementasi *Core Tax System* untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan terintegrasi.
- Optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan memastikan bahwa tindakan yang tidak benar dalam pelaporan pajak dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti.
- Insentif fiskal yang terarah dan terukur, dengan menyediakan kriteria yang jelas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang direncanakan.

Kebijakan teknis dalam APBN 2025, fokus lebih mendalam pada:

Technical Policies in the APBN 2025 will focus more deeply on:

-  Implementasi *core tax* untuk memperkuat sistem perpajakan inti untuk efisiensi yang lebih baik.
Implementation of Core Tax to strengthen the core tax system for better efficiency.
-  Penegakan hukum dengan memprioritaskan pengawasan terhadap wajib pajak HWI untuk memastikan kepatuhan.
Law Enforcement by prioritizing oversight of HWI taxpayers to ensure compliance.
-  Peningkatan kerjasama perpajakan internasional dengan mendorong kolaborasi dengan negara lain dalam pengelolaan pajak.
Enhancement of International Tax Cooperation to encourage collaboration with other countries in tax management.



Pemanfaatan *Digital Forensic* menggunakan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran pajak secara lebih efektif.

Utilization of digital forensics using technology to detect tax violations more effectively.



Insentif fiskal yang terarah dan terukur dengan melanjutkan kriteria yang jelas untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

Targeted and Measurable Fiscal Incentives to continuing the approach of clear criteria to promote economic growth.

Mulai 2024 dan 2025, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan perpajakan yang menasar *High Wealth Individuals (HWI)*. Pada tahun 2024, fokus pada "ekstensifikasi wajib pajak HWI," sedangkan pada tahun 2025, penekanan akan ada pada "pengawasan wajib pajak HWI."

Starting in 2024 and 2025, the Ministry of Finance reaffirms its commitment to implementing tax policies aimed at High Wealth Individuals (HWI). In 2024, the focus will be on "extensification of HWI taxpayers," while in 2025, emphasis will shift to "oversight of HWI taxpayers."



Produk Penelitian dan Pengetahuan Research and Knowledge Products

The PRAKARSA menyelesaikan 13 penelitian di tahun 2024, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 9 penelitian.

The PRAKARSA completed 13 research projects in 2024, an increase compared to 9 projects in 2023.


Penelitian Research
Kebijakan Ekonomi Economy Policy



Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023

Assessing Fiscal Incentives for Foreign Investment in ASEAN Member States (2021-2023)



Kecenderungan belanja publik dan privatisasi pendidikan di negara-negara ASEAN Pasca COVID-19

Trends in Public Spending and Education Privatization in ASEAN Countries Post-COVID-19



Kebijakan Insentif dan Hak Asasi Manusia di Rantai Pasok Perikanan ASEAN

Incentive Policy and Human Rights in the ASEAN Fisheries Supply Chain



Plastik dan Ketidakadilan dalam Insentif Pajak

Plastic and Inequality in Tax Incentives



Penelitian Research
Kebijakan Sosial Social Policy



Jaminan Pensiun pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP)

Pension Guarantees for Non-Wage Workers (PBPUP)



Towards Future-Proof Society: Adaptive Social Protection Against Climate Change

Towards Future-Proof Society: Adaptive Social Protection Against Climate Change

Laporan Presiden untuk monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan Semester 2 tahun 2023 oleh DJSN
Presidential Report for Monitoring and Evaluation of BPJS Employment for Semester 2 of 2023 by DJSN



Penelitian Research
Kebijakan Pembangunan dan Berkelanjutan Sustainable Development



Melacak Jejak Pembiayaan:
Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia

Tracking Financial Footprints: Environmental and Social Impacts of the Nickel Industry in Indonesia



Kajian mengenai keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

Study on Bank Involvement in Environmental, Social, and Governance Issues in the Pulp and Paper Industry in Indonesia



Riset Bank Assessment tahun 2024

Grand Design Ekonomi Hijau Indonesia

Grand Design Ekonomi Hijau Indonesia
Indonesia's Green Economy Grand Design

Studi Penilaian Peluang untuk Penganggaran Pembangunan Rendah Karbon di Tingkat Provinsi, termasuk Dana Insentif Daerah (DID)

Assessment Study on Opportunities for Low Carbon Development Budgeting at the Provincial Level, including Regional Incentive Funds (DID)

Highlight Penelitian
Research Highlight

Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia
Tracking Financial Footprints: Environmental and Social Impacts of the Nickel Industry in Indonesia



Penelitian The PRAKARSA menunjukkan cadangan nikel terbesar Indonesia belum memberi manfaat bagi masyarakat lokal akibat kemiskinan dan dampak sosial-lingkungan.

The PRAKARSA's research shows that Indonesia's largest nickel reserves have not provided benefits for local communities due to poverty and socio-environmental impacts.

Penelitian ini menjadi salah satu produk yang paling banyak diunduh pada tahun 2024, dengan 1.883 unduhan. Penelitian ini menyoroti di Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel yang terbesar secara global tidak sebanding dengan eksternalitas yang terjadi. Cadangan nikel di Indonesia mencapai 42,3 persen dari total cadangan nikel dunia. Meskipun potensi ini meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) royalti nikel secara signifikan—dari Rp 531 miliar pada 2015 menjadi Rp 4,18 triliun pada Mei 2022, namun eksternalitas negatif dari industri nikel, seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, tetap menjadi masalah serius.

This research became one of the most downloaded products in 2024, with 1,883 downloads. It highlights Indonesia's position as the largest holder of nickel reserves globally, which does not correspond with the externalities that occur. Indonesia's nickel reserves account for 42.3% of the world's total reserves. While this potential significantly boosts Non-Tax State Revenue (PNBP) from nickel royalties—from IDR 531 billion in 2015 to IDR 4.18 trillion in May 2022—negative externalities from the nickel industry, such as environmental degradation and human rights violations, remain serious issues.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, seperti baterai kendaraan listrik dan hilirisasi industri nikel, sementara isu-isu penting seperti hak masyarakat adat dan perempuan kurang mendapat perhatian. Aliran investasi di sektor hulu nikel didominasi oleh pemodal asal China, yang berfokus di provinsi kaya nikel seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Namun, keuntungan dari investasi ini cenderung kembali ke negara asal investor, mengakibatkan dampak positif yang minim bagi Indonesia.

The PRAKARSA telah menyampaikan hasil penelitian ini pada *International Parliamentary Inquiry ASEAN Parliamentarians for Human Rights*, 22 Juli 2024. The PRAKARSA menggarisbawahi bahwa meskipun industri nikel menjanjikan manfaat ekonomi, masyarakat sekitar tambang masih terjebak dalam kemiskinan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di provinsi penghasil nikel tetap tinggi, dengan banyak masyarakat lokal tidak merasakan manfaat dari kebijakan hilirisasi.

The research findings indicate that media coverage predominantly focuses on economic aspects, such as electric vehicle batteries and the downstream processing of the nickel industry, while critical issues like indigenous rights and women's rights receive less attention. Investment flows in the upstream nickel sector are largely dominated by Chinese investors, concentrated in nickel-rich provinces like Sulawesi and North Maluku. However, the benefits of this investment tend to return to the investors' home countries, resulting in minimal positive impacts for Indonesia.

The PRAKARSA presented the findings of this research at the International Parliamentary Inquiry of ASEAN Parliamentarians for Human Rights on July 22, 2024. The organization emphasized that despite the economic benefits promised by the nickel industry, local communities around the mines remain trapped in poverty. Unemployment and poverty rates in nickel-producing provinces remain high, with many local residents not experiencing the benefits of downstream policies.



Kebijakan tersebut belum memberikan efek berganda yang diharapkan. Penyerapan tenaga kerja terbatas dan masih banyaknya tenaga kerja asing menjadi penghalang bagi masyarakat lokal. Sebagai contoh, Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kemiskinan 11,43 persen yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, provinsi penghasil nikel seperti Papua dan Maluku Utara menunjukkan Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) tertinggi.

The PRAKARSA berharap agar kedepannya ada

The policy has not yet produced the expected multiplier effects. Limited job absorption and the prevalence of foreign labor remain barriers for local communities. For instance, Southeast Sulawesi has a poverty rate of 11.43%, which is higher than the national average. Additionally, nickel-producing provinces like Papua and North Maluku show the highest Multidimensional Poverty Index (MPI).

The PRAKARSA hopes that in the future, there will

pemerataan pembangunan di wilayah industri nikel dan mendorong pemerintah untuk mewajibkan perusahaan tambang melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

be more equitable development in nickel industry regions and encourages the government to require mining companies to conduct human rights due diligence. This step is expected to minimize negative impacts and ensure that economic benefits are felt more equitably by local communities.

Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023

Assessing Fiscal Incentives for Foreign Investment in ASEAN Member States 2021-2023



Penelitian kolaboratif The PRAKARSA dan Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS) ini meninjau kebijakan insentif pajak di negara-negara ASEAN pasca Covid-19, menyoroti efektivitas insentif dalam menarik investasi asing langsung (FDI), hubungan dengan tata kelola, serta implikasi penetapan tarif pajak minimum global.

This collaborative study by The PRAKARSA and the Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS) reviews tax incentive policies in ASEAN countries post-Covid-19, highlighting their effectiveness in attracting foreign direct investment (FDI), the link with governance, and the implications of the global minimum corporate tax rate.

Penelitian ini menempati posisi kedua terbanyak dengan 1.415 unduhan sepanjang tahun 2024. Hasil kolaborasi antara *The PRAKARSA dan Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS)* ini merupakan bagian dari *Think-tank Network* di ASEAN.

Studi ini melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan insentif pajak di setiap negara anggota ASEAN, dengan fokus pada perubahan yang terjadi pasca-Covid-19 (2020-2021). Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik mengenai kerangka hukum yang mengatur insentif pajak di kawasan ini. Dengan menyajikan analisis luas mengenai berbagai bentuk insentif baik pajak maupun non-pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan insentif yang redundan dan tidak efektif, yang dapat menghambat upaya menarik Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)* dan berdampak negatif pada ekonomi serta masyarakat.

This research ranked second in downloads, with 1,415 downloads throughout 2024. A collaboration between The PRAKARSA and the Vietnam Center for Economic and Strategic Studies (VESS), it is part of the Think Tank Network in ASEAN.

This study provides a comprehensive review of tax incentive policies in each ASEAN member state, focusing on changes that occurred in the post-Covid-19 period (2020-2021). Its main objective is to offer the public a thorough understanding of the legal framework governing tax incentives in the region. By presenting an extensive analysis of various forms of both tax and non-tax incentives, the study identifies redundant and ineffective policies that may hinder efforts to attract Foreign Direct Investment (FDI) and negatively impact the economy and society.

Selain itu, penelitian ini juga mengestimasi hubungan antara aliran masuk FDI, kesenjangan insentif, dan tata kelola yang baik. Hasilnya menunjukkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Korporasi rata-rata di ASEAN telah menurun menjadi sekitar 20%, dengan sejumlah insentif perpajakan tambahan di beberapa negara. Analisis menemukan adanya korelasi kuat antara tata kelola yang baik dan FDI, meskipun hubungan antara FDI dan kesenjangan insentif tergolong lemah. Penelitian ini menegaskan bahwa insentif pajak kurang efektif dalam menarik FDI di ASEAN dan mengusulkan bahwa tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% yang ditetapkan oleh OECD terlalu rendah untuk negara berkembang di kawasan ini, sehingga perlu dipertimbangkan kembali.

The research identifies redundant and ineffective incentive policies that may hinder efforts to attract Foreign Direct Investment (FDI) and negatively impact the economy and society. Additionally, it estimates the relationship between FDI inflows, incentive gaps, and good governance. Results indicate that the average Corporate Income Tax rate in ASEAN has decreased to around 20%, with additional tax incentives in several countries. The analysis finds a strong correlation between good governance and FDI, although the relationship between FDI and incentive gaps is relatively weak. The study emphasizes that tax incentives are less effective in attracting FDI in ASEAN and suggests that the global minimum corporate tax rate of 15% set by the OECD is too low for developing countries in the region, warranting reconsideration.



Hasil penelitian ini telah disampaikan kepada pemerintah dan perwakilan duta besar negara-negara ASEAN dalam diskusi publik bertajuk *“Update on Fiscal Policy Landscape in ASEAN: From Macro Economics to Public Spending”* pada 6 Juni 2024. The PRAKARSA berharap agar semakin banyak think tank lain di ASEAN yang bergabung dalam aliansi ini, untuk bersama-sama menghasilkan bukti yang dapat mendorong terciptanya kebijakan fiskal yang adil di Kawasan ini.

The findings of this research have been presented to the government and ambassadors from ASEAN countries during a public discussion titled *“Update on Fiscal Policy Landscape in ASEAN: From Macro Economics to Public Spending”* on June 6, 2024. The PRAKARSA hopes that more think tanks in ASEAN will join this alliance to collaboratively produce evidence that can promote the creation of fair fiscal policies in the region.

Plastik dan Ketidakadilan dalam Insentif Pajak Plastic and Inequality in Tax Incentives



Penelitian ini menyoroti ketidakselarasan antara kebijakan insentif pajak Indonesia dan upaya penanggulangan polusi plastik, dengan menunjukkan bagaimana insentif seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk mendorong penggunaan plastik virgin, menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta kerugian ekonomi yang besar, sekaligus menekankan perlunya kebijakan ekonomi sirkular dan penerapan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR).

This study highlights the misalignment between Indonesia's tax incentive policies and efforts to tackle plastic pollution, showing how measures such as tax holidays and import duty exemptions encourage virgin plastic use, cause environmental and social harm, and lead to major economic losses, while underscoring the need for stronger circular economy policies and Extended Producer Responsibility (EPR).

Penelitian ini membahas isu serius polusi plastik di Indonesia, yang merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Fokus utama penelitian ini adalah analisis kebijakan insentif pemerintah terhadap industri plastik. Fakta menarik, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani limbah plastik, pendekatan yang diambil masih terbatas pada aspek hilir dan belum menyentuh masalah di hulu. Insentif pajak, seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk untuk bahan baku justru memperburuk masalah. Hal ini karena mendorong penggunaan plastik virgin yang lebih kompetitif dalam harga. Kebijakan ini kemudian justru menciptakan eksternalitas negatif yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Dampak finansial dari insentif pajak ini juga cukup signifikan, dengan potensi kehilangan pendapatan pajak mencapai USD 54 juta per tahun. Di sisi lain, kerugian ekonomi akibat polusi plastik diperkirakan mencapai USD 450 juta, yang mempengaruhi sektor-sektor seperti perikanan, transportasi, dan pariwisata. Penelitian ini menunjukkan ketidakselarasan antara kebijakan ekonomi dan tujuan lingkungan. Meskipun ada upaya untuk mengurangi limbah

This research, which is a collaborative research between The PRAKARSA and NEXUS3 Foundation, addresses the serious issue of plastic pollution in Indonesia, which damages ecosystems and poses risks to human health. The main focus of this study is the analysis of government tax incentives for the plastic industry. Notably, although the government has implemented various policies to tackle plastic waste, the approaches taken are still limited to downstream aspects and do not address upstream issues. Tax incentives, such as tax holidays and tariff exemptions for raw materials, exacerbate the problem by encouraging the use of more competitively priced virgin plastic. This policy creates negative externalities that harm the environment and society.

The financial impact of these tax incentives is also significant, with potential tax revenue losses reaching USD 54 million per year. Conversely, the economic losses from plastic pollution are estimated at USD 450 million, affecting sectors such as fisheries, transportation, and tourism. The research highlights the misalignment between economic policies and environmental goals. Despite efforts to reduce plastic waste through a circular economy

plastik melalui pendekatan ekonomi sirkular, insentif pajak masih mendominasi kebijakan fiskal.

Penelitian ini menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan insentif pajak, perencanaan transisi yang jelas untuk pengurangan penggunaan plastik, penerapan sistem Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR), serta pelarangan bahan kimia berbahaya dalam produksi plastik. Hasil penelitian ini juga telah disampaikan oleh NEXUS3 pada pertemuan yang membahas perjanjian global tentang polusi plastik, yang dikenal sebagai "Plastic Treaty," yang berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada akhir tahun 2024.

approach, tax incentives still dominate fiscal policies.

The study offers several recommendations, including a comprehensive evaluation of tax incentive policies, clear transition planning for reducing plastic use, implementation of an Extended Producer Responsibility (EPR) system, and a ban on hazardous chemicals in plastic production. The findings of this research were also presented by NEXUS3 at a meeting discussing the global treaty on plastic pollution, known as the "Plastic Treaty," held in Busan, South Korea, at the end of 2024.

Ringkasan Kebijakan Policy Briefs

Kebijakan Ekonomi Economic Policy

Di tahun 2024, The PRAKARSA berhasil memproduksi sebanyak 9 *policy brief* di berbagai isu. Jumlah ini naik jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 8 *policy brief*.

In 2024, The PRAKARSA successfully produced 9 policy briefs on various issues, an increase compared to 8 policy briefs produced in 2023.



Edisi 46 Edition 46
Policy Brief | Juni 2024 June 2024

Bridging the Gap: Towards Fair Corporate Tax Practices in ASEAN

Bridging the Gap: Towards Fair Corporate Tax Practices in ASEAN



Edisi 49 Edition 49
Police Brief | September 2024 September 2024

Karam Nasib Pekerja Perikanan di Indonesia: Absennya Perlindungan Hak Asasi Manusia

The Plight of Fishery Workers in Indonesia: The Absence of Human Rights Protection



Edisi 50 Edition 50
Policy Brief | November 2024 November 2024

Mendorong Keadilan: Reformasi Insentif Pemerintah dalam Sektor Perikanan untuk Kesejahteraan Pekerja dan Keberlanjutan

Promoting Justice: Government Incentive Reforms in the Fisheries Sector for Worker Welfare and Sustainability



Edisi 51 Edition 51
Policy Brief | Desember 2024 December 2024

Mendorong Optimalisasi Anggaran Pendidikan untuk Pemenuhan Hak Pendidikan yang Merata

Encouraging the Optimization of Education Budget for Equitable Fulfilment of the Right to Education

Kebijakan Sosial Social Policy



PRAKARSA led
RDI Policy Brief No.1(CSWH) | Februari 2024 February 2024

Overcoming Barriers to Mainstream and Operationalise Adaptive Social Protection in Local Regions with Multiple Risk Contexts

Overcoming Barriers to Mainstream and Operationalise Adaptive Social Protection in Local Regions with Multiple Risk Contexts

Kebijakan Pembangunan dan Berkelanjutan Sustainable Development Policy



Edisi 45 Edition 450
Policy Brief | Mei 2024 May 2024

Glorifikasi Pertumbuhan Ekonomi dan Trilemma Energi dalam Industri Nikel

Glorifying Economic Growth and the Energy Trilemma in the Nickel Industry



Fact sheet

Kendeng Movement, and the impact of the cement industry on the local community in Kendeng Mountain.

Kendeng Movement, and the impact of the cement industry on the local community in Kendeng Mountain.



Edisi 47 Edition 47

Police Brief | Juli 2024 July 2024

Perangkap Nikel: Menyeimbangkan Profitabilitas, Keberlanjutan, dan Transisi Energi

The Nickel Trap: Balancing Profitability, Sustainability, and Energy Transition



Edisi 48 Edition 48

Police Brief | Agustus 2024 August 2024

Jejak Pembiayaan yang Mengancam Lingkungan dan HAM: Kasus Pulp dan Kertas di Riau

Financial Footprints Threatening the Environment and Human Rights: The Pulp and Paper Case in Riau

Highlight Policy Brief
Policy Brief Highlight

Karam Nasib Pekerja Perikanan di Indonesia: Absennya Perlindungan Hak Asasi Manusia
The Plight of Fishery Workers in Indonesia: The Absence of Human Rights Protection



Di tahun 2024, The PRAKARSA menyoroti isu bisnis dan hak asasi manusia, terutama terkait pelanggaran HAM yang dihadapi oleh pekerja di sektor perikanan di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah produsen perikanan

In 2024, The PRAKARSA highlighted the issue of business and human rights, particularly regarding human rights violations faced by workers in the fishery sector in Indonesia. Despite Indonesia



Policy brief ini menyoroti pelanggaran HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia, termasuk utang nelayan, pekerja anak, dan perdagangan manusia, serta menekankan perlunya uji tuntas HAM dan penguatan regulasi untuk melindungi pekerja sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.

This policy brief highlights human rights violations faced by workers in Indonesia's fisheries sector, including fishermen's debt, child labor, and human trafficking, while emphasizing the need for human rights due diligence and stronger regulations to protect workers as part of sustainable economic development.

terbesar di Asia Tenggara, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir tetap memprihatinkan, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. *Policy brief* ini menunjukkan bahwa nelayan sering terjebak dalam utang akibat posisi tawar yang lemah dan rendahnya pendidikan serta literasi keuangan. Implementasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR)* menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan legislasi yang berpotensi merugikan hak pekerja. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan masalah seperti pekerja anak dan perdagangan manusia masih meluas. Oleh karena itu, *policy brief* ini menekankan perlunya implementasi uji tuntas HAM dan penguatan kebijakan serta regulasi untuk melindungi pekerja di sektor perikanan. Keberhasilan dalam melindungi hak-hak pekerja penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan *policy brief* ini merupakan yang paling banyak diunduh pada tahun 2024 dengan 621 unduhan.

being the largest fishery producer in Southeast Asia, the socio-economic conditions of coastal communities remain concerning, with poverty rates exceeding the national average. This policy brief indicates that fishermen often find themselves trapped in debt due to weak bargaining positions and low levels of education and financial literacy. The implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR) faces challenges, including a lack of political will from the government and legislation that could potentially harm workers' rights. Weak law enforcement has led to widespread issues such as child labor and human trafficking. Therefore, this policy brief emphasizes the necessity of implementing human rights due diligence and strengthening policies and regulations to protect workers in the fishery sector. Success in safeguarding workers' rights is crucial for sustainable economic development, and this policy brief was the most downloaded in 2024, with 621 downloads.



Jejak Pembiayaan yang Mengancam Lingkungan dan HAM: Kasus Pulp dan Kertas di Riau Financial Footprints Threatening the Environment and Human Rights: The Pulp and Paper Case in Riau



Policy brief ini mengungkap dampak negatif pembiayaan sektor pulp dan kertas di Riau yang menyebabkan deforestasi masif dan konflik sosial, serta menekankan perlunya regulasi ketat dan komitmen lembaga keuangan untuk memastikan praktik pembiayaan yang bertanggung jawab demi keberlanjutan ekosistem dan perlindungan masyarakat.

This policy brief reveals the negative impacts of financing in the pulp and paper sector in Riau, which has led to massive deforestation and social conflicts, and emphasizes the need for stricter regulations and stronger commitment from financial institutions to ensure responsible financing practices for ecosystem sustainability and community protection.

Di isu kebijakan pembangunan berkelanjutan, The PRAKARSA konsisten memantau keterlibatan bank dalam pembiayaan bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). *Policy brief* ini mengungkap dampak negatif industri pulp dan kertas di Indonesia, khususnya di Riau, terkait kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dari 2016 hingga September 2022, bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan Mizuho Financial telah mendanai sektor ini dengan total mencapai USD 26,432 miliar. Meskipun diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, praktik pembiayaan yang tidak bertanggung jawab justru memperburuk kondisi lingkungan dan sosial, termasuk deforestasi masif dan konflik dengan masyarakat adat. Dalam periode 1982 hingga 2023, tutupan hutan alami di Riau menurun drastis dari 6,4 juta hektare menjadi 1,3 juta hektare, mengancam keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat lokal. *Policy brief*

In the context of sustainable development policy, The PRAKARSA consistently monitors the involvement of banks in financing environmentally, socially, and governance (ESG) responsible businesses. This policy brief reveals the negative impacts of the pulp and paper industry in Indonesia, particularly in Riau, concerning environmental degradation and human rights violations. From 2016 to September 2022, major banks such as BRI, Mandiri, BCA, BNI, and Mizuho Financial have financed this sector with a total of USD 26.432 billion. Although the intention was to create jobs, irresponsible financing practices have exacerbated environmental and social conditions, leading to massive deforestation and conflicts with indigenous communities. Between 1982 and 2023, natural forest cover in Riau drastically decreased from 6.4 million hectares to 1.3 million hectares, threatening biodiversity and the well-being of local communities. This policy brief emphasizes the need for stricter regulations

ini menekankan perlunya regulasi lebih ketat dan komitmen lembaga keuangan untuk memastikan pembiayaan yang bertanggung jawab, sehingga risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial dapat diminimalkan demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

and a commitment from financial institutions to ensure responsible financing, thereby minimizing risks of environmental damage and social conflict for the sustainability of ecosystems and the welfare of communities.

Overcoming Barriers to Mainstream and Operationalise Adaptive Social Protection in Local Regions with Multiple Risk Contexts

Overcoming Barriers to Mainstream and Operationalise Adaptive Social Protection in Local Regions with Multiple Risk Contexts



Policy brief ini menyoroti urgensi penerapan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) di Indonesia untuk memperkuat ketahanan rumah tangga rentan terhadap guncangan seperti bencana dan perubahan iklim, sekaligus menekankan perlunya komitmen pemerintah lebih kuat, perbaikan data dan monitoring, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah, yang didukung rencana aksi nasional dan platform terpadu guna memastikan implementasi efektif.

This policy brief highlights the urgency of implementing Adaptive Social Protection (ASP) in Indonesia to strengthen vulnerable households against shocks such as disasters and climate change, while emphasizing the need for stronger government commitment, improved data and monitoring, and enhanced local government capacity, supported by a national action plan and an integrated platform to ensure effective implementation.

The PRAKARSA menjadi bagian dari konsorsium riset KONEKSI yang dipimpin oleh RDI (*Resilience Development Initiative*) dan CDU (*Charles Darwin University*), mengangkat isu perlindungan sosial adaptif di Indonesia. *Policy brief* ini disusun untuk menyoroti urgensi implementasi *Adaptive Social Protection (ASP)* dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko, termasuk bencana dan perubahan iklim. *Policy brief* ini menjelaskan konsep ASP yang menggabungkan perlindungan sosial, manajemen risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, bertujuan untuk memperkuat kapasitas rumah tangga rentan dalam menghadapi guncangan dan mencegah kemiskinan. Namun, tantangan dalam mengarusutamakan ASP di Indonesia masih signifikan, termasuk kurangnya komitmen pemerintah, kualitas data yang buruk, dan monitoring yang tidak memadai. Selain itu, dokumen ini juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat kapasitas

The PRAKARSA is part of the KONEKSI research consortium led by the Resilience Development Initiative (RDI) and Charles Darwin University (CDU), focusing on the issue of adaptive social protection in Indonesia. This policy brief has been prepared to highlight the urgency of implementing Adaptive Social Protection (ASP) to enhance community resilience against various risks, including disasters and climate change. The brief explains the concept of ASP, which integrates social protection, disaster risk management, and climate change adaptation, aimed at strengthening the capacity of vulnerable households to face shocks and prevent poverty. However, significant challenges remain in mainstreaming ASP in Indonesia, including a lack of government commitment, poor data quality, and inadequate monitoring. Additionally, the document highlights obstacles faced by local governments, such as limited human resources, infrastructure, and coordination among stakeholders. To address these issues, it is essential to strengthen the capacity of local governments and establish a platform by the National Development Planning Agency (Bappenas) to integrate social protection, disaster

pemerintah daerah serta membentuk *platform* oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengintegrasikan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Rekomendasi dalam *policy brief* ini juga menekankan perlunya Rencana Aksi Nasional untuk ASP guna membimbing implementasi di tingkat lokal dan memastikan keterlibatan semua pihak.

risk reduction, and climate change adaptation. The recommendations in this policy brief also emphasize the need for a National Action Plan for ASP to guide implementation at the local level and ensure the involvement of all parties.


Opini Opinion

Di tahun 2024, The PRAKARSA berhasil memproduksi sebanyak 21 op-ed media di berbagai isu. Jumlah ini naik jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 10 opini.

In 2024, The PRAKARSA successfully produced 21 media op-eds on various issues. This represents an increase compared to 2023, when there were 10 op-eds

Kebijakan Ekonomi Economic Policy




 Kompas.id 25 Maret 2024 March 25, 2024

Mengintegrasikan Negara Pembangunan dan Institusi Inklusif
Integrating Development States and Inclusive Institutions

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



 Kompas.id 26 Juli 2024 July 25, 2024

Melampaui Deindustrialisasi Prematur Melalui "Self-Discovery"
Overcoming Premature Deindustrialization Through "Self-Discovery"

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Kompas.com 02 Sept. 2024 Sept. 02, 2024

Memahami Alam Pikir dan Konsep Ekonomi Prabowo
Understanding Prabowo's Economic Mindset and Concepts

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro

Kebijakan Sosial Social Policy



The Conversation 12 Feb. 2024 Feb. 12, 2024

Apa yang gagal dilihat oleh capres-cawapres soal buruh perempuan?

What Did the Presidential Candidates Fail to See Regarding Women Workers?

Ditulis oleh Eka Afrina Djamhari & Eksanti Amalia Kusuma Wardhani
Written by Eka Afrina Djamhari & Eksanti Amalia Kusuma



The Conversation 14 Feb. 2024 Feb. 14, 2024

Sulitnya perempuan masuk parlemen, kecuali yang berasal dari dinasti politik

The Difficulty for Women to Enter Parliament, Except for Those from Political Dynasties?

Ditulis oleh Eksanti Amalia Kusuma Wardhani
Written by Eka Afrina Djamhari



The Jakarta Post 31 Mei 2024 Mei 25, 2024

Enforcing childcare as a primary necessity
Enforcing childcare as a primary necessity

Ditulis oleh Eksanti Amalia Kusuma Wardhani
Written by Eksanti Amalia Kusuma Wardhani



The Conversation 25 Mei 2024 May 25, 2024

Target penurunan kemiskinan Jokowi tak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan pemerintahan berikutnya?

Jokowi's Target for Poverty Reduction Has Not Been Met. What Should the Next Administration Do?

Ditulis oleh Eka Afrina Djamhari & Bintang Aulia Lutfi
Written by Eka Afrina Djamhari & Bintang Aulia Lutfi



East Asia Forum 06 Juni 2024 June 06, 2024

Indonesia's pension system leaves younger generations at risk

Indonesia's pension system leaves younger generations at risk

Ditulis oleh Darmawan Prasetya
Written by Darmawan Prasetya



Kompas.id 17 Maret 2024 March 17, 2024

Lansia dan Pentingnya Layanan Perawatan Sosial Menyeluruh

The Elderly and the Importance of Comprehensive Social Care Services

Ditulis oleh Victoria Fanggaldae
Written by Victoria Fanggaldae



The Conversation 30 Okt. 2024 Oct. 30, 2024

Minim akses dan pelatihan: Ekonomi hijau yang kelabu bagi penyandang disabilitas

Limited Access and Training: A Grey Green Economy for Persons with Disabilities

Ditulis oleh Darmawan Prasetya
Written by Darmawan Prasetya



Asian Times 16 Sept. 2024 Sept. 16, 2024

Precarity trap: Gig economy failing Asia's youth
Precarity trap: Gig economy failing Asia's youth

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Kompas.com 29 Agust. 2024 Aug. 29, 2024

Mengatasi Kombinasi Mematikan: PHK dan Turunnya Kelas Menengah

Overcoming the Deadly Combination: Layoffs and the Decline of the Middle Class

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro

Kebijakan Pembangunan dan Berkelanjutan Sustainable Development



East Asian Forum 24 April 2024 April 24, 2024

Precarity trap: Gig economy failing Asia's youth
Precarity trap: Gig economy failing Asia's youth

Ditulis oleh Herni Ramdlaningrum & Yekti Pratiwi
Written by Herni Ramdlaningrum & Yekti Pratiwi



The Jakarta Post 23 Feb. 2024 Feb. 23, 2024

The new president should embrace inclusive and responsible business practices

The new president should embrace inclusive and responsible business practices

Ditulis oleh Herni Ramdlaningrum
Written by Herni Ramdlaningrum



Kompas.com 05 Jan. 2024 Jan. 05, 2024

Mengapa Malaysia dan Singapura Hambat Industri Semikonduktor Indonesia

Why Malaysia and Singapore Hinder Indonesia's Semiconductor Industry

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Kompas.id 19 April 2024 April 19, 2024

Precarity trap: Dialog Agama Melalui Praksis SDGs
Religious Dialogue Through the Practice of SDGs

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Green Network 30 April 2024 April 30, 2024

A Tale of Two Futures
A Tale of Two Futures

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Green Network 09 April 2024 April 09, 2024

The Great Green Divide, Call for Global Unity
The Great Green Divide, Call for Global Unity

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Asia Times 28 Okt. 2024 Oct. 28, 2024

Prabowo's big chance to be a global green leader
Prabowo's big chance to be a global green leader

Ditulis oleh Setyo Budiantoro
Written by Setyo Budiantoro



Katadata 17 Sept. 2024 Sept. 17, 2024

Nikel dan Transisi Energi: Antara Harapan dan Realitas
Nickel and Energy Transition: Between Hope and Reality

Ditulis oleh Ricko Nurmansyah
Written by Ricko Nurmansyah

Karam Nasib Pekerja Perikanan di Indonesia: Absennya Perlindungan Hak Asasi Manusia The Plight of Fishery Workers in Indonesia: The Absence of Human Rights Protection

The PRAKARSA aktif membangun pemahaman publik melalui opini editorial. Salah satu tulisan Setyo Budiantoro, Peneliti Senior The PRAKARSA yang menyoroti pentingnya kebijakan inklusif dalam konteks model developmental state yang sukses di negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Opini ini menunjukkan bahwa intervensi strategis dan peran aktif pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan sosial-ekonomi dengan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor strategis dan menciptakan ekosistem inovasi. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen pemerintah terhadap pengembangan industri, koordinasi erat antara pemerintah, sektor bisnis, dan institusi penelitian, serta kebijakan pendidikan yang progresif. Meskipun intervensi pemerintah diperlukan, penting untuk menetapkan batasan agar tidak menghambat inovasi swasta dan menciptakan ketergantungan

interventions and an active government role can accelerate socio-economic growth by directing resources toward strategic sectors and creating an innovation ecosystem. The key to success lies in the government's commitment to industrial development, close coordination among government entities, the business sector, and research institutions, as well as progressive educational policies. While government intervention is necessary, it is crucial to establish





pada subsidi. Keberhasilan model ini juga bergantung pada adanya birokrasi yang efisien dan lembaga yang mendukung peran aktif pemerintah, guna mencegah kolusi dan korupsi yang bisa merusak ekonomi.

boundaries to avoid hindering private innovation and creating dependency on subsidies. The success of this model also depends on an efficient bureaucracy and institutions that support the active role of the government, in order to prevent collusion and corruption that could undermine the economy.

Artikel Jurnal dan Book Chapter-2024 Journal Articles and Book Chapters - 2024



Death by A Thousand Cuts: Double Burden and Subordination of Female-Ride Hailing Drivers Towards Social Security Services.

Death by A Thousand Cuts: Double Burden and Subordination of Female-Ride Hailing Drivers Towards Social Security Services.

Ditulis oleh Aqilatul Layyinah dan Eksanti Amalia Kusuma Wardhani di Jurnal Salus Cultura Kemenko PMK.

Authors Aqilatul Layyinah and Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, Published in Journal Salus Cultura, Kemenko PMK

The realities of social care in Indonesia: the cases of older people living in-place and nursing homes in four Indonesian provinces

The realities of social care in Indonesia: the cases of older people living in-place and nursing homes in four Indonesian provinces

Ditulis oleh Victoria Fanggidae dan Herni Ramdlaningrum (bab buku, yang akan datang). Bristol University Press oleh Sheffield University.

Authors Victoria Fanggidae and Herni Ramdlaningrum (book chapter, upcoming). Bristol University Press, Sheffield University.

Household Adaptiveness to Climate Change Risks: Insights from Sumba, Indonesia.

Household Adaptiveness to Climate Change Risks: Insights from Sumba, Indonesia.

Ditulis bersama oleh peneliti dari konsorsium RDI KONEKSI termasuk Victoria Fanggidae, terbit dalam SSRN Paper.

Authors Collaborative research from the RDI KONEKSI consortium, including Victoria Fanggidae, Published in SSRN Paper.

Community as Solution to Climate Change: Understanding Informal Arrangements to Complement Formal Adaptive Social Protection

Community as Solution to Climate Change: Understanding Informal Arrangements to Complement Formal Adaptive Social Protection

Ditulis bersama oleh peneliti dari konsorsium KONEKSI yang dipimpin RDI dan CDU termasuk Victoria Fanggidae dan Darmawan Prasetya, terbit dalam SSRN Paper.

Authors Collaborative research from the KONEKSI consortium led by RDI and CDU, including Victoria Fanggidae and Darmawan Prasetya, published in SSRN Paper.

Sekilas unit bisnis Business Unit Overview

Di tengah kondisi global yang semakin dinamis dan menantang, organisasi *think tank* seperti The PRAKARSA dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan unit bisnis guna membangun kemandirian pendanaan. Kemandirian yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas organisasi dalam menjalankan misi dan visinya. Salah satu langkah strategis dalam hal ini adalah melalui pengembangan unit bisnis yang telah direncanakan dalam rencana strategis organisasi.

Pada tahap awal pengembangan unit bisnis, The PRAKARSA akan memanfaatkan kapasitas yang ada dengan mengerjakan proyek-proyek seminar, pelatihan, serta penelitian dan evaluasi yang diminta oleh klien, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, selama tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi.

Dengan mengembangkan unit bisnis yang strategis, The PRAKARSA tidak hanya akan meningkatkan kemandirian finansial, tetapi juga memastikan bahwa organisasi tetap dapat berkontribusi secara maksimal dalam pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

In the face of increasingly dynamic and challenging global conditions, think tank organizations like The PRAKARSA are confronted with the need to develop a business unit to achieve funding independence. Sustainable independence is crucial to ensuring the continuity and effectiveness of the organization in carrying out its mission and vision. One strategic step in this regard is the development of a business unit, as outlined in the organization's strategic plan.

In the initial stages of developing this business unit, The PRAKARSA will leverage existing capacities by undertaking seminar projects, training, as well as research and evaluation requested by clients from both governmental and non-governmental sectors, provided they do not conflict with the organization's vision and mission.

By strategically developing this business unit, The PRAKARSA aims not only to enhance financial independence but also to ensure that the organization can continue to contribute significantly to the development of inclusive and sustainable policies.



Pelatihan Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief Policy Analysis and Policy Brief Writing Training



Dalam upaya membangun kemandirian pendanaan dan meningkatkan kapasitas organisasi, The PRAKARSA telah mengembangkan unit bisnis yang mencakup penyelenggaraan pelatihan analisis kebijakan dan penulisan *policy brief*. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan yang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) FISIP UI.

Pelatihan ini bertujuan memberikan peserta pemahaman mendalam tentang dasar-dasar analisis kebijakan, analisis berbasis bukti, serta teknik komunikasi kebijakan. Peserta tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga *coaching* pribadi untuk mempraktikkan penulisan *policy brief*, mulai dari pemilihan topik hingga penyusunan rencana komunikasi.

Kegiatan ini dapat memperkuat keterampilan peserta dalam menyusun *policy brief* yang ringkas dan efektif, sehingga dapat mendukung advokasi kebijakan yang lebih baik. Dengan metode pembelajaran yang interaktif, peserta merasa lebih siap untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pekerjaan mereka.

Pada tahun 2024, pelatihan ini diselenggarakan dalam tiga batch, yaitu pada bulan Februari, Juni, dan Agustus, bertempat di LPPSP FISIP UI. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang,

In an effort to build funding independence and enhance organizational capacity, The PRAKARSA has developed a business unit that includes the organization of training sessions on policy analysis and policy brief writing. One of the activities conducted is a training program in collaboration with the Social and Political Research and Development Institute (LPPSP) at Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia.

This training aims to provide participants with a deep understanding of the fundamentals of policy analysis, evidence-based analysis, and communication techniques related to policy. Participants receive not only theoretical knowledge but also personal coaching to practice writing policy briefs, from topic selection to developing communication plans.

This activity strengthens participants' skills in crafting concise and effective policy briefs, thereby supporting better policy advocacy. With interactive learning methods, participants feel more prepared to apply the knowledge gained in their work.

In 2024, this training was held in three batches, in February, June, and August, at LPPSP FISIP UI. Participants came from various backgrounds, including government, private sector, academia,

termasuk pemerintah, perusahaan swasta, akademisi, dan aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS). The PRAKARSA menawarkan paket yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan peserta sebagai bagian dari pengembangan produk pelatihan.

Keberhasilan pelatihan ini mencerminkan komitmen The PRAKARSA untuk meningkatkan kapasitas analisis kebijakan di berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintahan, dan akademisi. Melihat tingginya minat dan kebutuhan akan pelatihan semacam ini, The PRAKARSA berencana untuk menyelenggarakan batch berikutnya, termasuk dalam format online, agar dapat diakses lebih luas oleh berbagai pihak di seluruh Indonesia.

and civil society organizations (CSOs). The PRAKARSA offers different packages to meet the needs of participants as part of its training product development.

The success of this training reflects The PRAKARSA's commitment to enhancing policy analysis capacity across various sectors, including civil society organizations, government, and academia. Given the high interest and demand for such training, The PRAKARSA plans to organize additional batches, including in an online format, to ensure broader accessibility for various stakeholders throughout Indonesia.

Innovation Lab: Inspirasi untuk Pendanaan Berkelanjutan Innovation Lab: Inspiration for Sustainable Funding



The PRAKARSA telah berpartisipasi dalam Innovation Lab yang diselenggarakan oleh Re.Search, sebuah inisiatif dari PLUS (*Platform Usaha Sosial*). InnoLAB merupakan momen penting bagi organisasi masyarakat sipil (NGO/CSO) untuk mengembangkan unit bisnis sebagai strategi diversifikasi pendanaan. Program ini telah dilaksanakan dua kali sejak dimulai pada tahun 2023, dengan tujuan menciptakan kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada donor.

The PRAKARSA has participated in the Innovation Lab organized by Re.Search, an initiative of PLUS (Social Enterprise Platform). InnoLAB represents a crucial moment for civil society organizations (NGOs/CSOs) to develop business units as a strategy for funding diversification. This program has been implemented twice since its inception in 2023, aiming to create financial independence and reduce reliance on donors.



Setelah empat bulan proses inkubasi yang intensif, acara puncak memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempresentasikan hasil kerja keras mereka. Diskusi dalam acara ini menekankan pentingnya diversifikasi pendanaan, termasuk potensi besar dari green investment dan pengembangan unit bisnis yang berkelanjutan untuk organisasi non-profit.

Dari 136 organisasi yang mendaftar, The PRAKARSA terpilih sebagai salah satu dari 14 organisasi yang mengikuti rangkaian kegiatan ini, bersama dengan organisasi lain seperti Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, Institut Pluralisme Indonesia, Alam Sehat Lestari (ASRI), *Human Initiative*, Yayasan IDEP Selaras Alam, Perkumpulan Open Street Map Indonesia, Hutan Kita Institute, Dompot Dhuafa, The SMERU Research Institute, Yayasan BaKTI, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), KITA Bhinneka Tunggal Ika, dan Perkumpulan OHANA Indonesia.

Selama pelatihan, The PRAKARSA dan peserta lainnya mengikuti serangkaian kegiatan intensif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas mereka dalam membangun unit bisnis yang berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup lima sesi *masterclass*, tiga sesi *sync session* untuk kolaborasi, serta mentorship selama empat bulan bersama para *Entrepreneur in Residence (EIR)* yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan bisnis. Program ini memberikan wawasan strategis dan praktis, sehingga organisasi masyarakat sipil, termasuk The PRAKARSA, dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan dampak sosial yang lebih besar.

Re.Search berfungsi sebagai *platform* yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan finansial organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dengan fokus pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, Re.Search mendukung organisasi dalam menciptakan dampak sosial yang lebih mandiri melalui diversifikasi sumber daya.

After an intensive four-month incubation process, the culminating event provided participants with the opportunity to present their hard work. Discussions during this event emphasized the importance of funding diversification, including the significant potential of green investment and the development of sustainable business units for non-profit organizations.

Out of 136 organizations that applied, The PRAKARSA was selected as one of 14 organizations participating in this series of activities, alongside others such as Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, Institut Pluralisme Indonesia, Alam Sehat Lestari (ASRI), Human Initiative, Yayasan IDEP Selaras Alam, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia, Hutan Kita Institute, Dompot Dhuafa, The SMERU Research Institute, Yayasan BaKTI, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), KITA Bhinneka Tunggal Ika, and Perkumpulan OHANA Indonesia.

During the training, The PRAKARSA and other participants engaged in a series of intensive activities designed to strengthen their capacity to build sustainable business units. These activities included five masterclass sessions, three sync sessions for collaboration, and four months of mentorship with Entrepreneur in Residence (EIR) experts with extensive experience in business development. This program provided strategic and practical insights, enabling civil society organizations, including The PRAKARSA, to enhance their competitiveness and create greater social impact.

Re.Search serves as a platform designed to strengthen the capacity and financial resilience of civil society organizations in Indonesia. With a focus on innovation, collaboration, and sustainability, Re.Search supports organizations in creating more independent social impacts through resource diversification.

Kolaborasi multipihak Multi-Stakeholder Collaboration

Kolaborasi Multipihak Multi-Stakeholder Collaboration

Kolaborasi adalah kunci mengoptimalkan dampak kebijakan. Tahun ini, The PRAKARSA memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan bekerja sama, kita dapat menggabungkan sumber daya dan pengetahuan untuk menciptakan kebijakan inklusif dan efektif. Pada 2024, The PRAKARSA bekerjasama dengan lembaga donor lewat berbagai program antara lain:

Collaboration is the key to optimizing policy impact. This year, The PRAKARSA expands partnerships with stakeholders, including government, civil society organizations, and the private sector. By working together, we can combine resources and knowledge to create more inclusive and effective policies. In 2024, The PRAKARSA collaborated with donors through various programs, including:

	Ford Foundation	Program BUILD (Building Institutions and Networks) BUILD (Building Institutions and Networks) program
	OXFAM (SIDA)	Program Fair Finance Asia Fair Finance Asia program
	OXFAM	Program Fair for All dan thinktank network development ASEAN Fair for All program and ASEAN think tank network development
	KONEKSI (DFAT/Cowater) via RDI dan CDU	Riset perlindungan sosial adaptif Research on adaptive social protection
	Oxford Policy Management (FCDO UK)	Program Low-Carbon Development Initiative Low-Carbon Development Initiative Program
	FES Indonesia dan Kemenko PMK	Kajian Jaminan Pensiun untuk pekerja mandiri BUILD (Building Institutions and Networks) program
	Cooper and Smith	Digital health ecosystem Digital health ecosystem
	Nexus3	Riset Kebijakan Insentif Fiskal Terhadap Industri Petrokimia Plastik Research on Fiscal Incentives Policy for the Plastic Petrochemical Industry

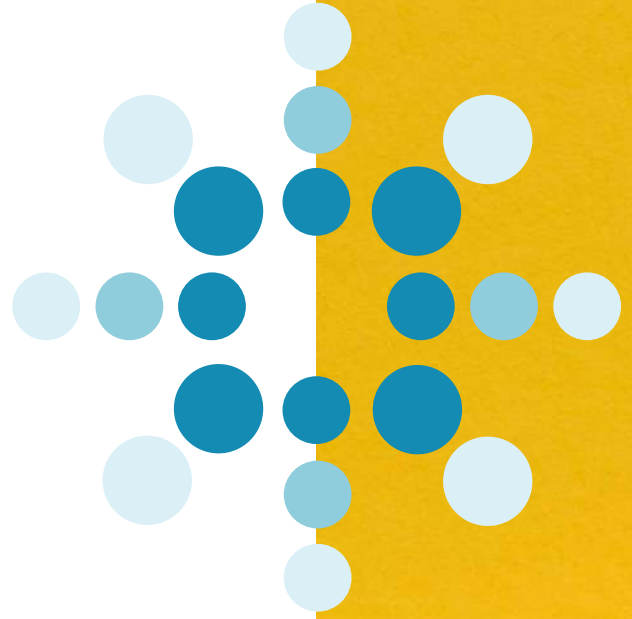
The PRAKARSA juga bekerjasama secara lebih cair dan luas dengan berbagai jaringan CSO, *think tank* dan universitas baik dalam maupun luar negeri, baik dalam konsorsium riset, kegiatan bersama maupun koalisi untuk advokasi.

The PRAKARSA also collaborates more fluidly and extensively with various networks of civil society organizations (CSOs), think tanks, and universities both domestically and internationally. This collaboration includes research consortiums, joint activities, and coalitions for advocacy.



03

Tantangan yang dihadapi tahun 2024
Challenges Encountered in 2024



Tantangan yang Dihadapi Sepanjang Tahun 2024

Challenges Faced Throughout 2024

Tahun 2024 menghadirkan beragam tantangan bagi The PRAKARSA, mulai dari keterbatasan kolaborasi dan akses data hingga perubahan sumber pendanaan global. Meski demikian, komitmen untuk memperkuat riset berbasis bukti dan advokasi kebijakan tetap menjadi fokus utama.

In 2024, The PRAKARSA faced various challenges, from limited collaboration and restricted data access to shifts in global funding. Nevertheless, the commitment to strengthening evidence-based research and policy advocacy remains the main focus.





Tantangan yang Dihadapi Sepanjang Tahun 2024 Challenges Faced Throughout 2024

Kolaborasi dan Kapasitas Collaboration and Capacity



Pada tahun 2024, The PRAKARSA menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat kolaborasi di antara organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam platform bersama.

In 2024, The PRAKARSA encountered several challenges that needed to be addressed to strengthen collaboration among civil society organizations (CSOs) within a joint platform.



Pertama, terdapat keterbatasan kapasitas dan fokus isu di antara anggota *platform*, yang mengakibatkan perlunya berbagi pengetahuan untuk menyamakan pemahaman, khususnya dalam hal keuangan berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya anggota koalisi yang fokus pada isu spesifik membuat masukan terkait Taxonomi Berkelanjutan untuk OJK kurang optimal di beberapa sektor. Di sisi lain, lembaga jasa keuangan masih mengalami kesulitan dalam menjalin kolaborasi yang efektif sehingga menghambat kemajuan inisiatif bersama.

Perubahan dalam struktur lembaga donor tradisional The PRAKARSA telah menyebabkan tumpang tindih program. Salah satunya seperti desentralisasi program dan merger antara Oxfam Indonesia dan Yayasan Penabulu telah menyebabkan tumpang tindih program di tingkat negara dan regional. Hal ini berpotensi mengakibatkan inefisiensi waktu, alokasi SDM staf dan pengurangan anggaran program. Kedepannya, diperlukan strategi yang jelas untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat, kerjasama antar organisasi dapat lebih kuat dengan memaksimalkan sumber daya.

First, there are limitations in capacity and issue focus among platform members, necessitating knowledge sharing to align understanding, particularly regarding sustainable finance.

Additionally, the lack of coalition members focused on specific issues has led to suboptimal input related to the Sustainable Taxonomy for OJK in various sectors. Financial service institutions are also struggling to establish effective collaborations, hindering the progress of joint initiatives.

Changes in the structure of traditional donor agencies have resulted in program overlaps. For example, the decentralization of programs and the merger between Oxfam Indonesia and Yayasan Penabulu have caused redundancies at both national and regional levels. This could lead to inefficiencies in time management, staff resource allocation, and program budget reductions. Moving forward, clear strategies are needed to address these challenges and enhance collaboration effectiveness among all stakeholders. With the right approach, cooperation between organizations can be strengthened by maximizing resources.

Akses Data Terbatas dan Sumber Pendanaan yang Berubah Limited Data Access and Changing Funding Source



Bagi *think tank* seperti The PRAKARSA, data yang berkualitas merupakan elemen krusial dalam mendukung penelitian. Namun, pada tahun 2024, kami menghadapi tantangan signifikan akibat perubahan atas akses data terbatas atau tertutup.

For think tanks like The PRAKARSA, quality data is crucial for supporting research. However, in 2024, we faced significant challenges due to limited or closed data access.



Ketergantungan pada data gratis menjadi hambatan dalam proses riset, terutama ketika biaya ke data berbayar semakin tinggi. Untuk ini, tim The PRAKARSA juga telah melakukan audiensi pada bulan Juni 2024 kepada pihak BPS untuk memberikan keringanan biaya data berbayar untuk organisasi riset lokal/nasional seperti The PRAKARSA, bukan hanya untuk organisasi internasional dan kampus, seperti praktik yang dilakukan selama ini. Namun permintaan ini masih perlu ditindaklanjuti karena terkendala kebijakan pemerintah pusat.

Di sisi pendanaan, bantuan resmi untuk pembangunan Official Development Assistance (ODA) cenderung stagnan. Meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,6% secara riil antara tahun 2022 dan 2023, namun proporsi ODA terhadap Produk Nasional Bruto (GNI) negara-negara *Development Assistance Committee (DAC)* stagnan, hanya meningkat sedikit dari 0,31% pada tahun 2010 menjadi 0,37% pada tahun 2023.

Lebih mengkhawatirkan, proyeksi menunjukkan penurunan ODA antara tahun 2023 dan 2024-2025. ODA terutama dari negara donor utama seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Kanada, Belanda, dan Norwegia. Laporan AidWatch 2024 dari CONCORD¹ mengungkapkan bahwa ODA dari negara-negara Uni Eropa semakin berfokus pada kepentingan nasional, yang

Dependence on free data has become a barrier in the research process, especially as the costs for paid data continue to rise. In response, The PRAKARSA's team conducted an audience with BPS in June 2024, seeking relief on paid data costs for local/national research organizations like The PRAKARSA, rather than just for international organizations and universities, as has been the practice. However, this request still needs to be followed up due to central government policy constraints.

On the funding side, official development assistance (ODA) for development tends to stagnate. Although there was a real increase of 1.6% between 2022 and 2023, the proportion of ODA to the Gross National Income (GNI) of Development Assistance Committee (DAC) countries remains stagnant, only slightly rising from 0.31% in 2010 to 0.37% in 2023.

More concerning is the projection of a decline in ODA between 2023 and 2024-2025, particularly from major donor countries like the United States, Germany, France, Canada, the Netherlands, and Norway. The 2024 AidWatch report from CONCORD¹ revealed that EU countries' ODA is increasingly focused on national interests, leading to reductions in both the quantity and quality of aid.

¹ CONCORD adalah Konfederasi CSO Eropa yang bekerja pada pembangunan berkelanjutan dan kerja sama internasional

¹ CONCORD is the European Confederation of Civil Society Organizations (CSOs) that focuses on sustainable development and international cooperation.



mengakibatkan penurunan baik dalam kuantitas maupun kualitas bantuan. Pengalihan bantuan yang signifikan ke Ukraina sebagai respons terhadap konflik Rusia-Ukraina juga menjadi perhatian.

Di tengah kondisi ini, muncul narasi anti-ODA yang berkembang dari ideologi populis dan sayap kanan ekstrem, yang berkontribusi pada penurunan pengeluaran bantuan. Untuk 27 negara anggota Uni Eropa, ODA yang dilaporkan pada tahun 2023 adalah 0,51% dari *Gross National Income (GNI)*, masih jauh di bawah komitmen ODA negara maju sebesar 0,7% dari GNI.

Secara empiris, terdapat tren yang perlu dicatat. Misalnya, *Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)* Inggris mengalami pemotongan langsung hingga £300 juta sebelum akhir tahun fiskal 2024-2025, meskipun di sisi lain akan menerima tambahan £540 juta yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengeluaran bantuan. USAID juga telah menekankan pentingnya 'lokalisasi' dalam bantuan dan terjadi penghentian bantuan akibat 'Trump effect'. Sementara itu, bantuan luar negeri dari Australia untuk Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, memberikan harapan di tengah dinamika ODA global yang kompleks. Namun, tren pendanaan untuk isu sosial dan fiskal semakin menurun, sementara tema perubahan iklim, transisi energi, dan lingkungan mendominasi berbagai panggilan proposal dari donor seperti EU, GIZ, FCDO, dan DFAT.

Selain itu, ada pergeseran fokus pendanaan yang lebih mengarah kepada pengembangan komunitas dan intervensi akar rumput, dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat intervensi tidak langsung. Kebijakan kini lebih berorientasi pada *Government to Government (G to G)*, sehingga seringkali berujung pada bantuan teknis langsung kepada pemerintah. Call for proposal tambahan dalam sistem lembaga donor seperti Oxfam juga tidak lagi dapat diakses akibat proses merger Oxfam di Indonesia semakin membatasi peluang pendanaan baru.

Significant aid shifts to Ukraine in response to the Russia-Ukraine conflict further exacerbate this issue.

Amid these conditions, an anti-ODA narrative stemming from populist and far-right ideologies contributes to declining aid expenditures. For the 27 EU member states, reported ODA in 2023 was 0.51% of GNI, still far below the 0.7% commitment from developed countries.

Empirically, trends need to be noted. For instance, the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) faced a direct cut of £300 million before the end of the 2024-2025 fiscal year, although it will receive an additional £540 million that can be used to increase aid expenditures. USAID has also emphasized the importance of 'localization' in aid, with some funding being halted due to the 'Trump effect.' Meanwhile, foreign aid from Australia to Indonesia shows an increasing trend, offering hope amid the complex dynamics of global ODA. However, funding trends for social and fiscal issues are declining, while climate change, energy transition, and environmental themes dominate donor proposal calls from entities like the EU, GIZ, FCDO, and DFAT.

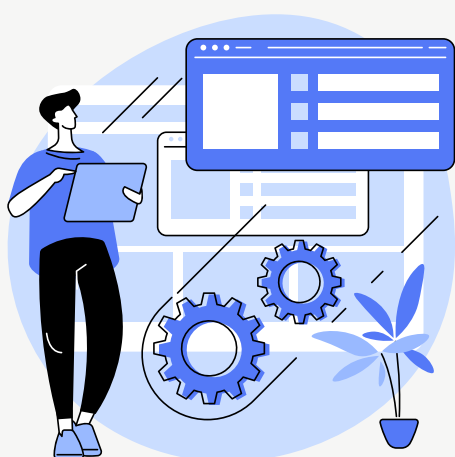
Additionally, there is a funding focus shift towards community development and grassroots interventions, rather than indirect policy interventions. Current policies are more oriented towards Government to Government (G to G) assistance, often resulting in direct technical aid to governments. Additional calls for proposals within donor agency systems, such as Oxfam, have also become less accessible due to the ongoing merger process, further limiting new funding opportunities.

Operasional dan Implementasi Operations and Implementation



Kami juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi proyek. Pertama, respon pemerintah terhadap permintaan dialog kebijakan menjadi faktor yang di luar kontrol, sehingga sulit dipastikan sejalan dengan durasi pelaksanaan proyek.

We also face several challenges in project implementation. First, government responses to policy dialogue requests are often beyond our control, making it difficult to align with project timelines.



Pergantian pemimpin di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan juga menuntut pembangunan relasi dari awal sehingga menambah kompleksitas dalam proses.

Selanjutnya, proses penelitian di lapangan sering membutuhkan waktu tambahan. Terutama karena faktor lokasi yang dapat mempengaruhi aksesibilitas. Selain itu, kapasitas dan ketersediaan sumber daya internal dalam memproduksi media komunikasi *multiplatform* juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya komunikasi yang efektif untuk menyampaikan hasil dan temuan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Program *multi-years* seperti Low Carbon *Development Initiative* (LCDI) yang mulai berjalan pada pertengahan 2024 mengalami hambatan dalam proses administratif karena berbagai penyesuaian. Terakhir, dinamika lainnya yang juga menjadi tantangan adalah perubahan atas keterlibatan The PRAKARSA dalam *Tax and Fiscal Justice Asia* (TAFJA) untuk periode 2024-2027 dan perubahan pengelolaan F4A dari Oxfam Regional Asia menjadi di bawah Oxfam di Indonesia, berkontribusi dalam mengurangi kelancaran proses advokasi.

Leadership changes in ministries and government agencies require rebuilding relationships from scratch, adding complexity to the process.

Furthermore, field research processes often demand additional time due to accessibility issues related to location. Additionally, the capacity and availability of internal resources for producing *multiplatform* communication media are concerns, given the importance of effective communication to convey results and findings to the public and stakeholders.

Multi-year programs like the Low Carbon Development Initiative (LCDI), which commenced in mid-2024, are experiencing administrative hurdles due to various adjustments. Lastly, other dynamics posing challenges include changes in The PRAKARSA's involvement in the Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) for the 2024-2027 period and the management shift of Fair for All (F4A) from Oxfam Regional Asia to Oxfam Indonesia, contributing to reduced advocacy process fluidity.



Transparansi dan Akuntabilitas

Transparency and Accountability

Untuk memastikan akuntabilitas, audit dilakukan secara konsisten, baik terhadap organisasi maupun proyek. Audit tersebut ditangani oleh Kantor Akuntan Publik dan mengikuti standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

To ensure accountability, audits are conducted consistently, covering both the organizational and project levels. These audits are carried out by a Public Accounting Firm in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.





Ringkasan Kinerja Keuangan The PRAKARSA Summary of The PRAKARSA's Financial Performance

Kami secara konsisten melakukan audit baik audit organisasi maupun audit berdasarkan proyek. Audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We consistently conduct audits, both organizational audits and project-based audits. These audits are carried out by a Public Accounting Firm in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

1. Audit Organisasi Tahun Buku 2021
2. Audit Organisasi Tahun Buku 2022
3. Audit Proyek | Proyek Responsi bank/FFA 2022
4. Asistensi Pelaporan SPT Masa PPh 21 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022
5. Pelatihan Perpajakan PPh 21
6. *Anti-Corruption Workshop*
7. Pelatihan Kupas Tuntas ISAK 35 & Pengelolaan Keuangan Strategis untuk Organisasi Non Laba
8. Pendampingan pemutakhiran SOP Keuangan

1. Organizational Audit Financial Year 2021
2. Organizational Audit Financial Year 2022
3. Project Audit | Responsi Bank/FFA Project 2022
4. Assistance with Periodic Annual Income Tax Notification Letter 21 and Annual Notification Letter Corporate Income Tax for 2022
5. PPh 21 Taxation Training
6. Workshop Anti Corruption
7. Training on Comprehensive Discussion of ISAK 35 & Strategic Financial Management for Non-Profit Organizations
8. Assistance with Financial SOP Updates

2023

1. Audit Organisasi Tahun Buku 2023
2. Pendampingan pemutakhiran SOP Keuangan
3. Studi Banding ke INFID_Testimoni SANGO
4. Pelatihan Fasilitator & *Publik Speaking*
5. Kelas Pajak Online (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi)

1. Organizational Audit Financial Year 2023
2. Assistance in Updating Financial SOPs
3. Benchmarking Visit to INFID_Testimony SANGO
4. Facilitator & Public Speaking Training
5. Online Tax Class (Annual Individual Income Tax Return/Personal Income Tax - SPT)

2024



Hasil Audit Tahun 2024

Audit Result for 2024

Laporan keuangan terlampir menyajikan secara “wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan Perkumpulan PRAKARSA tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilakukan oleh KAP. Syarief Basir & Rekan

The attached financial report presents a “fair presentation in all material respects” of The PRAKARSA Association’s financial position as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year ending on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. The audit was conducted by KAP. Syarief Baasir

PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As Of December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	11.843.282.139	3b,4	8.877.328.278	Cash and cash equivalents
Piutang	709.651.037	5	325.699.693	Account receivables
Uang muka	7.340.690	6	230.735.176	Advances
Pajak dibayar dimuka	2.041.234	10a	-	Prepaid tax
TOTAL ASET LANCAR	12.562.315.100		9.433.763.147	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	17.773.665	3f,7	11.671.160	Fixed assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	17.773.665		11.671.160	TOTAL NONCURRENT ASSETS
TOTAL ASET	12.580.088.765		9.445.434.307	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Utang program	1.137.690.508	8	667.500.862	Project payable
Biaya yang masih harus dibayar	89.971.617	9	400.624.659	Accrued expenses
Utang pajak	942.251	10b	24.246.096	Tax payable
TOTAL LIABILITAS LANCAR	1.228.604.376		1.092.371.617	TOTAL CURRENT LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto dengan pembatasan	5.697.726.333	3c	3.158.865.096	With restrictions net assets
Aset neto tanpa pembatasan	5.653.758.056	3c	5.194.197.594	Without restrictions net assets
TOTAL ASET NETO	11.351.484.389		8.353.062.690	TOTAL NET ASSETS
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	12.580.088.765		9.445.434.307	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
 For The Year Ended December 31, 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Dengan pembatasan	10.682.396.336	3d,11	11.459.753.271	<i>With restrictions</i>
Tanpa pembatasan	1.593.790.298	3d,11	1.412.181.049	<i>Without restrictions</i>
TOTAL				
PENDAPATAN	12.276.186.634		12.871.934.320	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban program dengan pembatasan	-	3d,12a	-	<i>Program expenses with restrictions</i>
Beban program tanpa pembatasan	9.255.194.581	3d,12b	11.006.756.611	<i>Program expenses without restrictions</i>
TOTAL BIAYA	9.255.194.581		11.006.756.611	TOTAL EXPENSES
SURPLUS	3.020.992.053		1.865.177.709	SURPLUS
Pendapatan komprehensif lain	-		-	<i>Other comprehensive income</i>
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF	3.020.992.053		1.865.177.709	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGING NET ASSET
 For The Year Ended December 31, 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber daya:			<i>Net Assets with Restrictions from Resource Providers:</i>
Saldo awal	3.158.865.096	269.962.194	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian aset neto	(22.570.354)	432.323.672	<i>Net asset adjustments</i>
Pendapatan komprehensif tahun berjalan	10.682.396.336	11.459.753.271	<i>Comprehensive income for the year</i>
Reklasifikasi Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(8.120.964.745)	(9.003.174.041)	<i>Reclassification of net assets which released from restrictions</i>
Saldo akhir	5.697.726.333	3.158.865.096	<i>Ending balance</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Jumlah	5.697.726.333	3.158.865.096	Total
Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber daya:			<i>Net Assets Without Restrictions from Resource Providers:</i>
Saldo awal	5.194.197.594	5.785.599.115	<i>Beginning balance</i>
Pendapatan Komprehensif tahun berjalan	(7.661.404.283)	(9.594.575.562)	<i>Comprehensive income for the year</i>
Reklasifikasi Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	8.120.964.745	9.003.174.041	<i>Reclassification of net assets which released from restrictions</i>
Saldo akhir	5.653.758.056	5.194.197.594	<i>Ending Balance</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Jumlah	5.653.758.056	5.194.197.594	Total
Jumlah Aset Neto	11.351.484.389	8.353.062.690	Total Net Assets

PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Perubahan dalam aset neto	3.020.992.053	1.865.177.709	<i>Changing on net assets</i>
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas bersih:			<i>Adjustments to reconcile changes in net assets to net cash:</i>
Penyusutan	3.896.495	14.537.838	<i>Depreciation</i>
Koreksi aset bersih	(22.570.354)	432.323.672	<i>Correction net asset</i>
PERUBAHAN ASET DAN LIABILITAS OPERASI			CHANGE IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES
Piutang	(383.951.344)	127.698.113	<i>Account receivables</i>
Uang muka	223.394.486	(215.735.176)	<i>Advance</i>
Biaya diterima dimuka	-	3.703.384	<i>Prepaid expenses</i>
Pajak diterima dimuka	(2.041.234)	-	<i>Prepaid tax</i>
Biaya yang masih harus dibayar	(310.653.042)	294.666.264	<i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	470.189.646	(111.795.646)	<i>Other payables</i>
Utang pajak	(23.303.845)	(509.108)	<i>Taxes payables</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	<u>2.975.952.861</u>	<u>2.410.067.050</u>	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	(9.999.000)	-	<i>Acquisition properties, plants and equipments</i>
Pelapasan Aset Tetap	-	-	<i>Disposal of properties, plants and equipments</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(9.999.000)</u>	<u>-</u>	Net cash flows used in investing activities
Penurunan kas dan setara kas	2.965.953.861	2.410.067.050	Decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>8.877.328.278</u>	<u>6.467.261.228</u>	Cash and cash equivalent at beginning of the years
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>11.843.282.139</u>	<u>8.877.328.278</u>	Cash and cash equivalent at the end of the years



Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak Compliance with Tax Regulations

The PRAKARSA mengimplementasikan kebijakan Strategi Perpajakan untuk mengatur semua aspek terkait perpajakan dan mitigasi risiko yang mungkin timbul. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa organisasi senantiasa mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, serta menjamin bahwa semua laporan pajak dilaporkan dan dibayarkan tepat waktu.

The PRAKARSA implements a tax strategy policy to govern all aspects related to taxation and mitigate potential risks. This policy aims to ensure that the organization consistently complies with all applicable tax regulations and guarantees that all tax reports are filed and paid on time.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The PRAKARSA berkomitmen untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pengungkapan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Organisasi melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nominal yang wajib dibayarkan, tanpa adanya pengurangan atau penundaan. 3. The PRAKARSA mengelola perpajakan dengan cara yang efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku, sambil mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. 4. Organisasi tidak mengadopsi perencanaan atau strategi pajak yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan untuk menghindari kewajiban perpajakannya. 5. The PRAKARSA berkomitmen untuk menjaga hubungan kerjaya yang konstruktif dengan otoritas perpajakan yang berwenang. Organisasi memberikan tanggapan yang tepat waktu dan akurat terhadap permintaan yang sah dari otoritas perpajakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The PRAKARSA is committed to fulfilling all tax obligations and disclosures in accordance with applicable regulations. 2. The organization makes tax payments in full, without any reductions or delays. 3. The PRAKARSA manages taxation in an efficient manner in line with relevant regulations, while optimizing value for stakeholders. 4. The organization does not adopt tax planning or strategies that deviate from statutory regulations to avoid tax obligations. 5. The PRAKARSA is committed to maintaining constructive working relationships with relevant tax authorities, providing timely and accurate responses to legitimate requests from these authorities. |
|--|--|

Prinsip strategi perpajakan
Principles of the tax strategy

Dengan demikian, The PRAKARSA memastikan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pelaporan perpajakan, termasuk PPh 21 dan PPh Badan, baik untuk masa maupun tahunan. Komitmen ini tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada reputasi baik organisasi dalam menjalankan kewajiban pada negara.

By adhering to these principles, The PRAKARSA ensures compliance with withholding and tax reporting obligations, including PPh 21 and corporate income tax, both for periodic and annual requirements. This commitment not only supports tax compliance but also contributes to the organization's positive reputation in fulfilling its obligations to the state.





Rencana dan Inisiatif Tahun 2025

Plans and Initiatives for 2025

Memasuki tahun 2025, The PRAKARSA berkomitmen memperluas jangkauan di tingkat nasional, regional, dan global. Melalui perencanaan strategis, kolaborasi yang lebih kuat, dan diversifikasi pendanaan, kami terus mendorong ide-ide inovatif demi keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Entering 2025, The PRAKARSA is committed to expanding its reach at the national, regional, and global levels. Through strategic planning, stronger collaboration, and diversified funding, we continue to advance innovative ideas for socio-economic justice and public well-being.







05

Rencana dan Inisiatif Tahun 2025
Plans and Initiatives for 2025



Rencana dan Inisiatif Tahun 2025 Plans and Initiatives for 2025



Memasuki tahun 2025, The PRAKARSA berkomitmen untuk memperluas jangkauannya tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga di ranah regional dan global. Dengan mitra kerja yang beragam, termasuk CSO, institusi pendidikan, dan sektor swasta, The PRAKARSA semakin mendekati visinya untuk menjadi lembaga kajian dan pengembangan kapasitas berstandar internasional. Kami bertekad untuk memelopori ide-ide inovatif dan transformatif yang dapat mewujudkan keadilan sosial-ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan rencana strategis organisasi untuk periode 2021-2025, yang menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi dengan universitas, think tank, dan media massa, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kolaborasi ini, kami berupaya memperkuat visibilitas organisasi dan dampak dari program-program yang kami laksanakan.

Sebagai langkah awal, The PRAKARSA akan memulai proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2026-2030. Rencana ini akan menjadi panduan komprehensif bagi semua program dan aktivitas kami, serta memastikan keselarasan dengan visi dan misi organisasi. Dalam upaya meningkatkan efektivitas *fundraising*, kami akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk CSO, universitas, dan sektor swasta. Kerjasama ini diharapkan dapat mengakses sumber daya yang

As we enter 2025, The PRAKARSA is committed to expanding its reach not only domestically but also regionally and globally. With a diverse range of partners, including civil society organizations (CSOs), educational institutions, and the private sector, The PRAKARSA is increasingly approaching its vision of becoming an internationally recognized research and capacity development institution. We are determined to pioneer innovative and transformative ideas that can realize social-economic justice and well-being for communities.

This commitment aligns with the organization's strategic plan for the period 2021-2025, which emphasizes the importance of enhancing collaboration with universities, think tanks, and media outlets, both domestically and internationally. Through these collaborations, we aim to strengthen the visibility of the organization and the impact of our programs.

As a first step, The PRAKARSA will initiate the process of developing a Strategic Plan (Renstra) for the period 2026-2030. This plan will serve as a comprehensive guide for all our programs and activities, ensuring alignment with the organization's vision and mission. To enhance fundraising effectiveness, we will strengthen collaborations with various institutions, including CSOs, universities, and the private sector. This cooperation is expected to access greater resources and expand the impact of our programs.

lebih besar dan memperluas dampak dari program-program kami.

Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan peran *Research Associates*, yang akan dilibatkan lebih aktif dalam kegiatan *fundraising* dan pengendalian kualitas. Dengan memanfaatkan keahlian mereka, kami berharap dapat meningkatkan kualitas riset dan hasil yang dihasilkan, serta memperkuat program-program yang ada. Salah satu langkah strategis kami adalah menyelesaikan pendirian unit bisnis yang dirancang untuk mendukung diversifikasi sumber pendanaan. Unit ini diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial yang signifikan, memperkuat kemandirian The PRAKARSA, dan memastikan keberlanjutan inisiatif-inisiatif kami. Selain itu, kami akan melanjutkan kerja sama dengan LPPSP UI dalam mengembangkan pelatihan baru yang relevan dan inovatif. Pelatihan ini akan dirancang untuk meningkatkan kapasitas CSO dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mereka memiliki alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada.

Kami juga akan mempersiapkan transisi pasca program BUILD dukungan Ford Foundation dengan matang. Identifikasi kebutuhan dan strategi mitigasi merupakan hal yang harus kami persiapkan untuk memastikan keberlanjutan dari semua inisiatif yang telah kami laksanakan. Dengan demikian, dampak positif yang telah kami ciptakan dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kami akan melakukan restrukturisasi di bidang riset, program, dan administrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, kami dapat menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi publik.



Ah Maftuchan
Executive Director of
The PRAKARSA

Additionally, we will optimize the role of *Research Associates*, who will be actively involved in fundraising activities and quality control. By leveraging their expertise, we hope to improve the quality of research and outcomes produced, as well as strengthen existing programs. One of our strategic steps is to complete the establishment of a business unit designed to support the diversification of funding sources. This unit is expected to contribute significantly financially, enhancing The PRAKARSA's independence and ensuring the sustainability of our initiatives. Furthermore, we will continue our collaboration with LPPSP UI to develop new, relevant, and innovative training programs. These training sessions will be designed to enhance the capacity of CSOs and other stakeholders, equipping them with the necessary tools and knowledge to face existing challenges.

We will also prepare for a smooth transition following the BUILD program support phase out from the Ford Foundation in 2026. Identifying needs and mitigation strategies will be essential to ensure the sustainability of all initiatives we have implemented, allowing the positive impacts we have created to continue benefiting the community. In our efforts to improve operational efficiency and effectiveness, we will restructure our research, program, and administrative areas. This restructuring aims to ensure that every team member can contribute optimally according to their expertise and responsibilities. We believe that with strong collaboration and the right strategies, we can create significant and sustainable impacts for the public.



Media Engagement dan Public Relations

Media Engagement and Public Relations

Sepanjang 2024, The PRAKARSA semakin menguat sebagai rujukan dengan 245 kutipan media dan 172.671 unduhan publikasi. Dukungan digital serta hadirnya studio podcast turut memperkokoh peran PRAKARSA dalam menghadirkan riset bermutu bagi kebijakan publik.

Throughout 2024, The PRAKARSA strengthened its role as a reference with 245 media citations and 172,671 publication downloads. Digital support and the launch of a podcast studio further reinforced its commitment to delivering high-quality research for public policy.



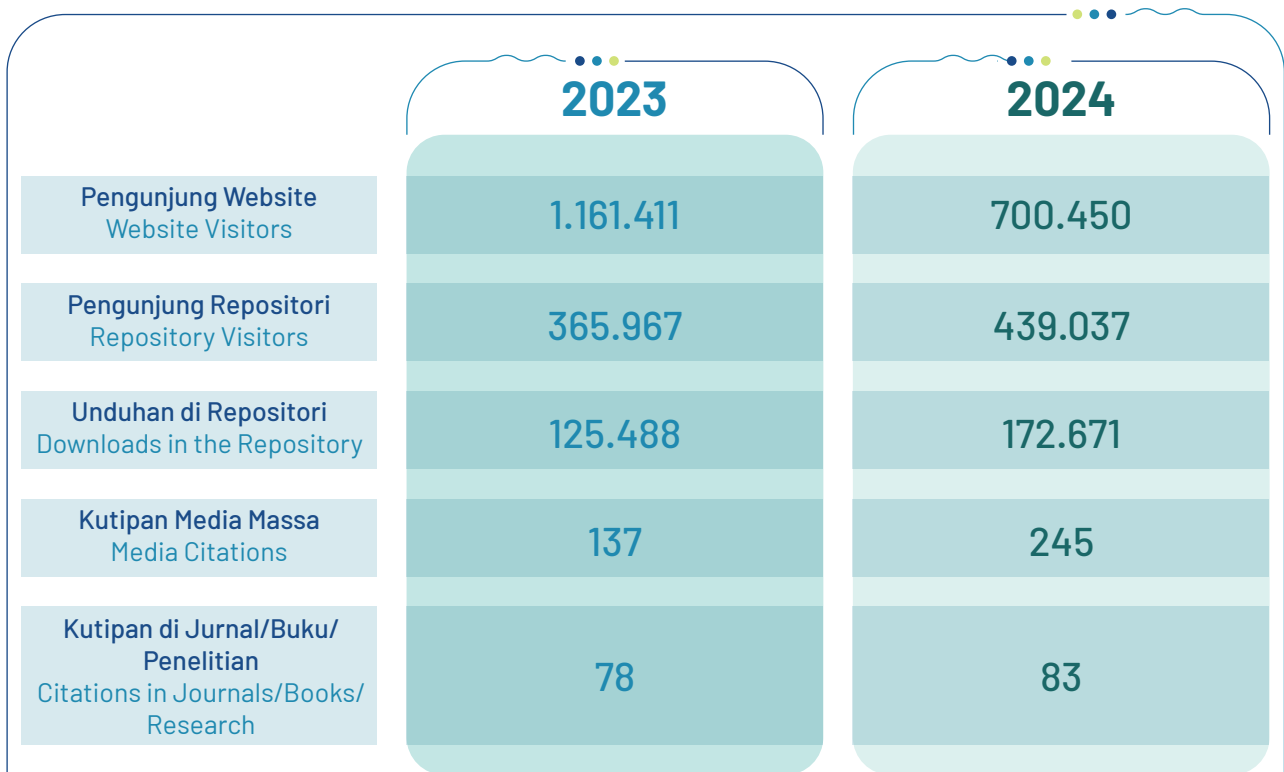




Kinerja Media dan Komunikasi Media and Communication Performance

Sepanjang tahun 2024, The PRAKARSA mengalami peningkatan sebagai rujukan. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah indikator seperti unduhan atas produk-produk yang telah dihasilkan oleh The PRAKARSA, kutipan di media massa dan kutipan di sejumlah jurnal, buku atau penelitian.

Throughout 2024, The PRAKARSA has experienced an increase in recognition as a reference point. This is evident from several indicators, such as the number of downloads of products produced by The PRAKARSA, citations in mass media, and citations in various journals, books, or research studies.



* Kutipan di jurnal/buku/penelitian hanya bersumber dari Google Scholar, sehingga jumlahnya mungkin lebih dari yang tercatat dalam laporan ini.

* Citations in journals, books, and research are sourced solely from Google Scholar, so the number may be higher than what is recorded in this report.

Tahun 2024 menandai peningkatan signifikan dalam kinerja media dan komunikasi The PRAKARSA. Kami mencatat total 245 kutipan di media massa, meningkat sekitar 56% dibandingkan dengan 137 kutipan pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penelitian dan produksi pengetahuan yang kami hasilkan semakin diperhatikan oleh media, baik dalam konteks opini maupun berita. Meskipun media nasional mendominasi kutipan riset kami, media lokal juga memberikan kontribusi dalam menyebarkan informasi mengenai isu-isu yang kami angkat.

Pada tahun yang sama, kami juga membangun infrastruktur pendukung dengan mendirikan studio untuk podcast. Menggunakan studio baru kami telah memproduksi dua episode yang membahas topik penting, yaitu kenaikan pajak 12% dan kritik terhadap hilirisasi nikel. Podcast kami berhasil menarik perhatian, dengan total 10.789 penonton sepanjang tahun. Isu hilirisasi nikel menjadi yang paling banyak diminati, mencerminkan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap diskusi kebijakan yang krusial. Kami juga mencatat peningkatan dukungan publik terhadap kebijakan yang diusulkan. Hal ini telah membuka ruang bagi diskusi yang lebih konstruktif mengenai implementasi kebijakan yang diusulkan.

Selain itu, jumlah unduhan publikasi The PRAKARSA mengalami kenaikan, mencapai 172.671 unduhan sepanjang 2024, meningkat dari 125.488 pada tahun sebelumnya. Publikasi yang paling banyak diunduh adalah "Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia" dengan 1.883 unduhan, diikuti oleh "Menilai Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Investasi Asing di Negara-Negara Anggota ASEAN 2021-2023" dengan 1.415 unduhan, dan "PB 49 - Karam Nasib Pekerja Perikanan di Indonesia: Absennya Perlindungan Hak Asasi Manusia" yang mencapai 621 unduhan. Peningkatan kutipan di media dan konten di media sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketertarikan pengunjung untuk mengakses website PRAKARSA.

Selain itu, dari sisi dukungan infrastruktur digital The PRAKARSA berhasil mendapatkan hibah dari

The year 2024 marks a significant improvement in the media and communication performance of The PRAKARSA. We recorded a total of 245 citations in mass media, an increase of approximately 56% compared to 137 citations in 2023. This increase indicates that the research and knowledge production we generate are receiving greater attention from the media, both in opinion pieces and news coverage. While national media dominate the citations of our research, local media also contribute to disseminating information on the issues we raise.

In the same year, we built supporting infrastructure by establishing a studio for podcasts. Using our new studio, we produced two episodes addressing important topics: a 12% tax increase and critiques of nickel downstream processing. Our podcast successfully attracted attention, with a total of 10,789 viewers throughout the year. The issue of nickel downstream processing garnered the most interest, reflecting the growing public engagement in crucial policy discussions. We also noted an increase in public support for the proposed policies, opening up space for more constructive discussions regarding their implementation.

Additionally, the number of downloads of The PRAKARSA's publications increased, reaching 172,671 downloads in 2024, up from 125,488 the previous year. The most downloaded publication was "Tracking Financial Trails: Environmental and Social Impacts of the Nickel Industry in Indonesia," with 1,883 downloads, followed by "Evaluating Fiscal Incentive Policies for Foreign Investment in ASEAN Member Countries 2021-2023" with 1,415 downloads, and "PB 49 - The Predicament of Fishery Workers in Indonesia: The Absence of Human Rights Protection," which reached 621 downloads. The increase in media citations and social media content also contributed to heightened visitor interest in accessing The PRAKARSA's website.

Furthermore, in terms of digital infrastructure support, The PRAKARSA successfully secured a



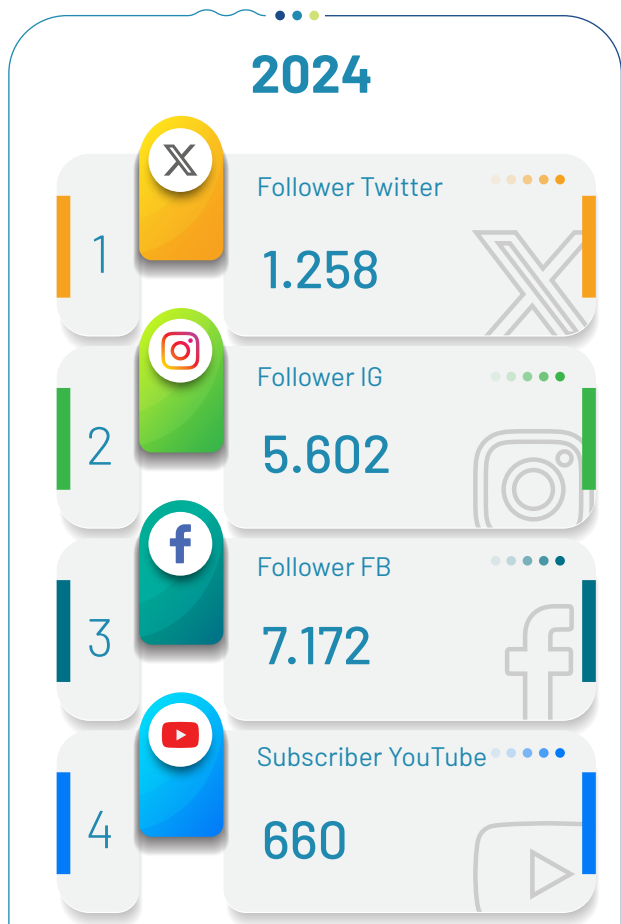
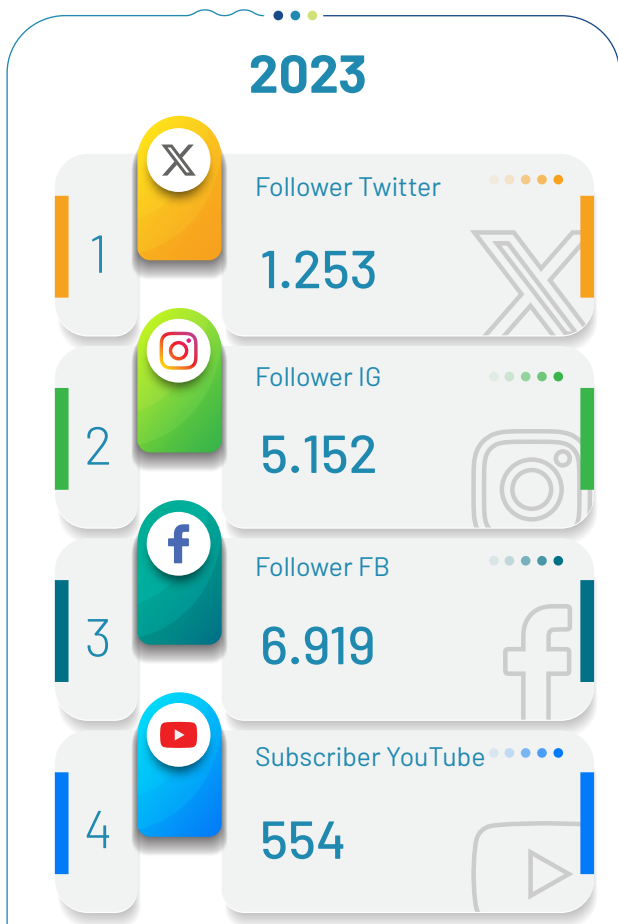
Techsoup, yang memungkinkan kami mengakses berbagai software dengan biaya yang terjangkau. Kami juga menerima dukungan dari Google dan Microsoft untuk memaksimalkan pemanfaatan produk-produk tersebut. Dengan semua pencapaian ini, The PRAKARSA semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menghadirkan riset berkualitas yang berdampak pada kebijakan publik.

grant from Techsoup, enabling us to access various software at affordable costs. We also received support from Google and Microsoft to maximize the utilization of these products. With all these achievements, The PRAKARSA continues to strengthen its position as an institution committed to delivering high-quality research that impacts public policy.

Kampanye Sosial Media Social Media Campaign

Kampanye di media sosial juga merupakan salah satu strategi komunikasi yang kami lakukan. The PRAKARSA menggunakan komunikasi melalui sosial media untuk lebih mendekatkan diri kepada publik dan menyampaikan informasi atas perbaikan kebijakan atau respon atas suatu isu. Pertumbuhan jumlah pengikut di berbagai platform media sosial sepanjang tahun.

Social media campaigns are also one of the communication strategies we employ. The PRAKARSA utilizes social media to engage more closely with the public and convey information regarding policy improvements or responses to specific issues. Throughout the year, we have seen growth in the number of followers across various social media platforms.



Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja media sosial The PRAKARSA, yang berhasil menjangkau publik dengan lebih luas. Jumlah pengikut di berbagai *platform* mengalami pertumbuhan yang positif. Di Twitter, Facebook, dan Instagram, kami mencatat peningkatan yang menggembirakan. Saluran YouTube juga mengalami kenaikan, dari 554 menjadi 660 pengikut. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu besar, hal ini tetap menunjukkan konsistensi kami dalam berkembang. Yang paling mencolok adalah LinkedIn, di mana jumlah pengikut meningkat drastis dari 103 menjadi 723, menandakan ketertarikan profesional yang semakin besar terhadap konten yang kami tawarkan.

The PRAKARSA juga berhasil meningkatkan kolaborasi dengan sekitar 34 lembaga lain sepanjang tahun 2024. Kerja sama ini menghasilkan konten berkualitas yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting, seperti kebijakan pajak, transisi energi, dan kesetaraan *gender*. Melalui kolaborasi ini, kami dapat menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan, memungkinkan publik untuk memahami konteks dan implikasi dari isu-isu tersebut dengan lebih baik. Kolaborasi juga memungkinkan menjangkau audience yang sebelumnya tidak terjangkau oleh kami.

Media sosial berfungsi sebagai alat vital bagi lembaga think tank seperti The PRAKARSA. *Platform* ini tidak hanya menjadi saluran untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk berdialog dan berinteraksi dengan publik. Dengan menggunakan media sosial, kami dapat menjangkau audiens yang lebih luas, mengedukasi masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam diskusi mengenai kebijakan publik.

Dengan semua pencapaian ini, The PRAKARSA semakin memperkuat posisinya sebagai sumber terpercaya dan berpengaruh tentang isu-isu krusial. Kami berkomitmen untuk terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana menjangkau dan melibatkan publik, serta mempromosikan ide-ide inovatif yang dapat membawa perubahan positif bagi publik.

The year 2024 has shown a significant increase in The PRAKARSA's social media performance, successfully reaching a wider audience. The number of followers across various platforms has experienced positive growth. On Twitter, Facebook, and Instagram, we have noted encouraging increases. Our YouTube channel also saw a rise in followers, from 554 to 660. Although this increase is modest, it still reflects our consistency in growth. The most notable change occurred on LinkedIn, where the number of followers surged from 103 to 723, indicating a growing interest from professionals in the content we provide.

The PRAKARSA also enhanced collaboration with approximately 34 other organizations throughout 2024. This partnership produced quality content that helped raise public awareness about important issues such as tax policy, energy transition, and gender equality. Through these collaborations, we were able to present more comprehensive and relevant information, allowing the public to better understand the context and implications of these issues. These partnerships also enabled us to reach audiences that we had not previously engaged.

Social media serves as a vital tool for think tanks like The PRAKARSA. This platform not only acts as a channel for disseminating information but also provides a space for dialogue and interaction with the public. By utilizing social media, we can reach a broader audience, educate the community, and encourage active participation in discussions regarding public policy.

With these achievements, The PRAKARSA has further strengthened its position as a trusted and influential source on critical issues. We are committed to continuing the use of social media as a means to reach and engage the public, while promoting innovative ideas that can bring positive change for the public.



Penutup

Closing

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi The PRAKARSA dalam memperkuat peran sebagai *think-tank* berpengaruh dan berkomitmen pada kebijakan inklusif serta berkelanjutan.

In 2024, The PRAKARSA reached a significant milestone by reinforcing its position as a leading think tank, advancing impactful research and advocacy to support inclusive and sustainable public policies.







Ringkasan Pencapaian Utama Tahun 2024

Summary of Key Achievements in 2024

The PRAKARSA secara konsisten berupaya menjadi lembaga *think-tank* yang berpengaruh dalam pengembangan kebijakan publik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Pencapaian ini tercermin dari partisipasi aktif kami dalam berbagai forum, termasuk C20 dan pertemuan internasional lainnya, yang memperkuat suara kami dalam isu-isu kebijakan utama. Kami juga menjalin kolaborasi yang erat dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memastikan partisipasi yang bermakna dalam reformasi kebijakan, yang terlihat dari upaya pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik dan berkualitas. Selain itu, pengembangan internal organisasi tetap menjadi fokus, dengan upaya peningkatan infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang kuat. Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam keberlanjutan organisasi, dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan advokasi pajak kekayaan, pengembangan kebijakan sosial adaptif, dan perayaan dua dekade perjalanan The PRAKARSA, semakin memperkuat komitmen kami terhadap kebijakan inklusif dan berkelanjutan.

The PRAKARSA has consistently strived to be an influential think tank in the development of public policy at national, regional, and international levels. This achievement is reflected in our active participation in various forums, including C20 and other international meetings, which strengthen our voice on key policy issues. We have also established close collaborations with civil society organizations (CSOs) to ensure meaningful participation in policy reforms, evident from government efforts in crafting better and higher-quality policies. Additionally, internal organizational development remains a focus, with efforts to enhance physical infrastructure, human resource development, and robust policy support. The year 2024 marks an important milestone in the sustainability of the organization, with strategic steps such as strengthening wealth tax advocacy, developing adaptive social policies, and celebrating two decades of The PRAKARSA's journey, further reinforcing our commitment to inclusive and sustainable policies.

The PRAKARSA terus memperkuat perannya sebagai *think-tank* berpengaruh melalui partisipasi aktif di forum nasional dan internasional, kolaborasi erat dengan masyarakat sipil, serta langkah strategis dalam advokasi dan kebijakan berkelanjutan.

The PRAKARSA continues to strengthen its role as an influential think tank through active participation in national and international forums, close collaboration with civil society, and strategic initiatives in advocacy and sustainable policies.





Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy



The PRAKARSA berkomitmen memperkuat strategi keberlanjutan melalui pemanfaatan media digital, konsistensi komunikasi publik, pengembangan program magang terstruktur, serta pendekatan fundraising yang lebih inovatif dan efisien.

The PRAKARSA is committed to strengthening its sustainability strategy through digital engagement, consistent public communication, structured internship programs, and more innovative and efficient fundraising approaches.

Pada tahun 2024, The PRAKARSA berkomitmen untuk memperkuat strategi keberlanjutan melalui inisiatif yang responsif terhadap perkembangan isu publik dan kebutuhan organisasi. Dalam era digital yang semakin berkembang, The PRAKARSA telah mengadopsi penggunaan media digital sebagai bagian integral dari komunikasi kami. Platform digital tidak hanya memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar dari pendatang baru yang sukses menerapkan strategi media yang agresif. Dengan pendekatan ini, PRAKARSA dapat tetap relevan dan menarik perhatian publik yang lebih besar.

Kami juga menyaksikan peningkatan permintaan untuk opini dan pernyataan dari media, terkait isu-isu yang telah diangkat sebelumnya. Hal ini menegaskan pentingnya

In 2024, The PRAKARSA is committed to strengthening sustainability strategies through initiatives responsive to public issue developments and organizational needs. In an increasingly digital era, we have adopted the use of digital media as an integral part of our communication. Digital platforms not only enable wider information dissemination but also provide opportunities to learn from newcomers who successfully implement aggressive media strategies. With this approach, PRAKARSA can remain relevant and attract a larger public audience.

We have also observed an increased demand for opinions and statements from the media regarding previously raised issues. This underscores the importance of consistency in

konsistensi dalam menyampaikan pesan serta membangun reputasi positif di mata publik. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap komunikasi, kami yakin dapat meningkatkan dampak dari setiap inisiatif yang kami jalankan.

Selain itu, tingginya permintaan untuk program magang dari kampus-kampus memerlukan penataan khusus. The PRAKARSA berkomitmen untuk menciptakan program internship yang terstruktur, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta, tetapi juga memenuhi kebutuhan organisasi. Kami percaya bahwa pengalaman yang bermanfaat akan mendorong pengembangan bakat muda yang kelak menjadi aset berharga bagi masyarakat.

Namun, kami juga menyadari perlunya merubah metode *fundraising*. Metode yang selama ini bersifat tradisional dan seringkali *exhaustive*, serta memiliki tingkat keberhasilan yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, The PRAKARSA akan menjajaki pendekatan yang lebih inovatif dan efisien, yang dapat meningkatkan efektivitas penggalangan dana dan mendukung keberlanjutan program-program kami.

Meskipun rekognisi yang diperoleh sangat berharga, kami juga harus menghadapi tantangan terkait dengan peningkatan beban kerja yang ditimbulkan. Waktu dan tenaga staf yang terbatas menjadi kendala dalam memelihara rekognisi yang telah diraih. Untuk itu, pengelolaan beban kerja yang lebih baik menjadi prioritas, agar staf dapat berkinerja optimal.

messaging and building a positive reputation in the public eye. With greater attention to communication, we believe we can enhance the impact of every initiative we undertake.

Moreover, the high demand for internship programs from universities necessitates special organization. The PRAKARSA is committed to creating structured internship programs that benefit participants while meeting the organization's needs. We believe that valuable experiences will foster the development of young talent who will become valuable assets to society.

However, we also recognize the need to change our fundraising methods. Traditional methods have often been exhaustive and uncertain in their success. Therefore, The PRAKARSA will explore more innovative and efficient approaches to enhance fundraising effectiveness and support the sustainability of our programs.

While the recognition we have received is invaluable, we must also face challenges related to the increased workload it entails. Limited staff time and energy pose obstacles to maintaining the recognition we have achieved. Hence, better workload management becomes a priority to enable staff to perform optimally.



Ungkapan Terima Kasih Expression of Gratitude

Tahun 2024 menjadi tahun penuh peluang dan tantangan, di mana The PRAKARSA berhasil menjaga pertumbuhan yang konsisten dan bertanggung jawab, serta terus berpihak pada kelompok terpinggirkan dengan dukungan staf, mitra, dan pemangku kepentingan.

2024 was a year of opportunities and challenges, where The PRAKARSA sustained consistent and responsible growth while continuing to stand with marginalized groups through the support of its staff, partners, and stakeholders.

Tahun 2024 telah menjadi tahun yang penuh peluang dan tantangan bagi PRAKARSA. Sebagai organisasi yang terus berkembang, kami berhasil menghadapi berbagai rintangan dengan baik. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa persiapan untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga adalah kunci keberhasilan. Kami meyakini bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, konsisten, dan bertanggung jawab.

Perjalanan dua dekade The PRAKARSA tidak akan terwujud tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Berkat dukungan tersebut, kami selalu berupaya untuk berpihak pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan akan berkontribusi pada pembangunan Indonesia di masa depan.

Sebagai penutup, Direktur Eksekutif The PRAKARSA ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh staf atas dedikasi dan kerja keras mereka. Tanpa komitmen dan kolaborasi dari tim yang luar biasa ini, pencapaian yang kami raih tidak akan mungkin terjadi. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jaringan, mitra, donor, dan pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan berharga. Semoga kita semua terus dapat berkontribusi secara positif untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan lebih inklusif.

The year 2024 has been filled with opportunities and challenges for The PRAKARSA. As an evolving organization, we have successfully navigated various obstacles. This experience has taught us that preparation for unexpected challenges is key to success. We believe we are on the right path to achieving strong, consistent, and responsible growth.

The two-decade journey of The PRAKARSA would not have been possible without the support of all of you. Thanks to this support, we continuously strive to advocate for marginalized groups in development. We believe our efforts will contribute to Indonesia's development in the future.

In closing, the Executive Director of The PRAKARSA wishes to extend heartfelt thanks to all staff for their dedication and hard work. Without the commitment and collaboration of this extraordinary team, our achievements would not have been possible. We also express our gratitude to all networks, partners, donors, and stakeholders who have provided valuable support. May we all continue to contribute positively to realizing a prosperous and more inclusive Indonesia.



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

Leveraging Impact for Inclusive Policy

The PRAKARSA



THE PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

+62 21 7811 798

perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

 PRAKARSA Podcast

www.theprakarsa.org